

## DOB KEMBALI DIPERTANYAKAN!

DPD RI Desak Pemerintah Terbitkan PP



### KHUSUS

MK Hapus Presidential  
Threshold Sultan Usulkan  
Capres Indenpenden

6

### NUSANTARA

DPD RI: Kaji Ulang  
Kategori PSN

13

### WARISAN DAERAH

Bukit Langkisau  
nan Memukau

54

# DOB dan Desain Besar Penataan Daerah

Desain besar penataan daerah di Indonesia yang dimulai sejak 2011 hingga direncanakan selesai pada 2025 bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik di daerah. Program ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali administrasi, dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi wilayahnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan kriteria ketat untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Hingga 2024, Indonesia telah menambah beberapa provinsi baru, termasuk Kalimantan Utara (2012) dan empat provinsi di Papua pada 2022: Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Saat ini terdapat 38 provinsi, meskipun kajian menyebutkan Indonesia idealnya memiliki lebih dari 40 provinsi untuk mencapai pemerataan pembangunan yang lebih baik.

Moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan sejak 2009 membatasi pembentukan DOB baru untuk mencegah munculnya daerah yang tidak mandiri secara ekonomi. Namun, kebijakan ini sering

dikritik karena dianggap menghambat aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan publik lebih baik. Di sisi lain, moratorium bertujuan memastikan kesiapan daerah baru dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan DPD RI, saat ini terdapat 337 tuntutan pemekaran di seluruh Indonesia, baik untuk provinsi, kabupaten, maupun kota.

Menariknya, kebijakan moratorium ini tidak memiliki dasar hukum formal berupa undang-undang dan hanya berbasis keputusan politik dan administrasi pemerintah pusat. Hal ini memunculkan dilema antara memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan serta anggaran negara.

Ke depan, pemerintah diharapkan lebih transparan dalam mengevaluasi efektivitas moratorium dan menetapkan kriteria yang jelas untuk DOB. Penghapusan atau revisi moratorium dapat dipertimbangkan dengan mekanisme evaluasi ketat agar aspirasi masyarakat tetap terakomodasi tanpa mengorbankan prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

**(Arso P Nugroho)**

## SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

**PENASEHAT:** Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **PENANGGUNGJAWAB:** Mahyu Darma  
**PEMIMPIN REDAKSI:** Heru Firdan; **REDAKTUR PELAKSANA:** Budi Fitra Helmi; **REDAKTUR FOTO & GRAFIS:** Agus Wiharto; **EDITOR SENIOR:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **TIM PENULIS ARTIKEL:** Heru Firdan, Budi Fitra Helmi, Intan Fitria Yuliani, Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah

### KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat 10270. Email : keranjangsenator@gmail.com Kotak Saran : majalah\_senator@dpd.go.id // website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri

# New Autonomous Regions and Grand Design of Regional Administration

*The grand design of regional administration in Indonesia commencing since 2011 until its designated completion in 2025 is to fix government administration and to improve public services in the regions. The program is expected to create equal development, shorten administration control, and strengthen regional government capacity in administering each own potential.*

*In the implementation, the government sets tight criteria to the formation of new autonomous regions (DOB). Until 2024 Indonesia has added a few new provinces, including North Kalimantan (2012) and four provinces in Papua in 2022, i.e., Southwest Papua, Central Papua, Highland Papua, and South Papua. At present there are 38 provinces, despite a study that suggests Indonesia to ideally have more than 40 provinces in order to reach a better development equality.*

*The moratorium on regional expansion which has been in effect since 2009 has restricted the formation of DOB to prevent the spring of economic-dependent regions. Nevertheless, the policy is frequently criticized because it is considered hampering the community aspiration*

*which yearns for a better public service. On the other hand, the moratorium is intended to ensure the readiness of new regions in infrastructure, man-power, and budgeting aspects. In accordance with data presented by the Minister of State Affair, Mr Tito Karnavian, in coordination meeting with DPD RI, currently there are 337 demands for expansion all over Indonesia, not only for provinces but also for regencies and cities.*

*Interestingly, the said moratorium policy doesn't have formal legal foundation such as laws as it is only based on political and administrative decision of the central government. It then raises dilemma between accommodating local community aspiration and keeping stability for government administration and state budgeting.*

*In the future the government is expected to be more transparent in evaluating the effectiveness of the moratorium and in setting clear criteria for DOB. Removal or revision of the moratorium can be exercised in close evaluating mechanism in order to keep the accommodation for people's aspiration not at the expense of good governance principles.*

**(Arso P Nugroho)**

## SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

**ADVISOR BOARD:** Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **NEWS IN CHARGE:** Mahyu Darma **EDITOR-IN-CHIEF:** Heru Firdan; **MANAGING EDITOR:** Budi Fitra Helmi; **PHOTO & GRAPHICS EDITOR:** Agus Wiharto; **SENIOR EDITORS:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **GRAPHIC DESIGNER & PHOTOGRAPHER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **ARTICLE WRITER:** Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah.

**EDITORIAL OFFICE** News and Media Division, 1st Floor, Building B, DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6, Central Jakarta 10270.  
Email: keranjangsenator@gmail.com Suggestions Box: majalah\_senator@dpd.go.id // website: www.dpd.go.id // IG: @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri

# DOB KEMBALI DIPERTANYAKAN!

## DPD RI Desak Pemerintah Terbitkan PP

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali mempertanyakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.



Komite I DPD RI ketika menerima audiensi Forkonas DOB. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Mas Aryo Kristiyanto**

Penulis

**S**elama sepuluh tahun terakhir, pemerintah menutup peluang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sebenarnya memberikan peluang bagi daerah untuk melakukan pemekaran. Namun, pelaksanaan pemekaran wilayah ini terganjal karena pemerintah belum menerbitkan aturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

Absennya PP yang mendukung pemekaran wilayah diperburuk dengan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasan pemerintah adalah kekhawatiran akan beban keuangan negara. Pembentukan DOB dianggap

berisiko menambah pengeluaran negara tanpa jaminan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Kini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pembentukan DOB. Dalam audiensi Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas DOB) dengan Komite I DPD RI, Senin (9/12/24), Anggota DPD RI asal Kalteng Teras Narang, mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan PP terkait DOB. “Kita harus terus perjuangkan agar pemerintah segera menerbitkan PP Pembentukan DOB ini,” tegas Teras Narang di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi, juga menekankan pentingnya pemekaran wilayah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Ia menyebut bahwa DOB dapat mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memperce-

pat pemerataan pembangunan. “Pemekaran ini menjadi salah satu solusi dalam upaya memajukan daerah dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya di daerah calon DOB,” ujar Muhdi.

Senator Amirul Tamim berharap pada tahun 2025 pemerintah dapat mengeluarkan PP tentang DOB. Untuk itu, Komite I DPD RI merencanakan langkah strategis, termasuk jadwal pembahasan intensif guna mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan tersebut. Harapan serupa diungkapkan oleh Anggota DPD RI Dapil Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah. Ia mendukung pencabutan moratorium pemekaran daerah. “Komite I perlu membuat usulan konkret agar pemerintah segera mencabut moratorium DOB,” tegas Ismeth.

Ketua Forkonas DOB, Majedi Darham, juga mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, terutama terkait pemekaran provinsi dan kabupaten/kota. (\*)

# Moratorium Tak Miliki Dasar Hukum yang Kuat!

Arso Pranoto Nugroho

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut), Pdt. Penrad Siagian, menegaskan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Dalam keterangannya, Senin (9/12/24), Penrad menyoroti bahwa moratorium pemekaran wilayah yang berlaku sejak 2014 telah menghambat aspirasi masyarakat daerah.

“Moratorium ini tidak memiliki dasar hukum kuat, hanya kebijakan pemerintahan tanpa landasan undang-undang atau peraturan pemerintah. Karena itu, harus dicabut. Pencabutan moratorium sangat diperlukan untuk menjawab aspirasi 329 daerah yang sudah lama mengantre menjadi DOB,” tegas Penrad saat audiensi di Kompleks Parlemen.

Penrad juga menekankan pentingnya dua regulasi utama, yakni Peraturan Pemerintah tentang Pemekaran Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah, sebagai turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014. Ketiadaan landasan hukum ini sering kali membuat



Komite I DPD RI ketika menerima audiensi Forkonas DOB. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

perjuangan pembentukan DOB terhenti di tataran wacana. “Kita perlu memastikan adanya landasan yuridis kokoh agar perjuangan DOB tidak hanya sebatas wacana,” ujarnya.

Untuk mempercepat proses ini, Penrad mengusulkan pembentukan tim kerja khusus atau *desk* DOB di DPD RI. Tim ini akan memperkuat komunikasi intensif antara DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DPR RI guna memastikan proses legislasi terkait DOB berjalan lebih cepat. Menurutnya, pemahaman kolektif antara lembaga-lembaga ini menjadi kunci sukses perjuangan DOB.

“DPD RI harus proaktif memfasilitasi komunikasi ini, memastikan DOB menjadi prioritas nasional. Pemekar-

an wilayah bukan hanya tuntutan, tetapi solusi untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” kata Penrad.

Ia juga mengingatkan bahwa tanpa DOB, ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah akan semakin lebar. “DOB adalah jalan bagi Indonesia untuk menjadi lebih maju, lebih merata, dan lebih adil. Tanpa itu, banyak daerah akan terus tertinggal,” ungkapnya. Karena itu, Penrad mendesak pemerintah segera mencabut moratorium pembentukan DOB.

DOB adalah solusi nyata untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di daerah-daerah terpencil yang telah lama menunggu kesempatan ini. (\*)

# Pemerintah Harus Buka Keran Pembentukan DOB

Theresia Oktavina

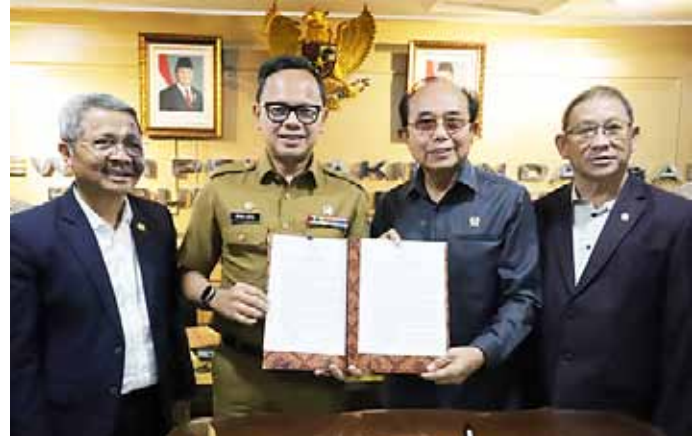
Penulis

**K**etua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andy Sofyan Hasdam, mendesak pemerintah untuk segera melakukan kajian terkait penerbitan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Kajian ini diperlukan untuk merespons keresahan daerah-daerah yang telah menunggu lama agar moratorium pemekaran DOB segera dibuka.

“Kami telah menerima audiensi dari Forkonas calon DOB di seluruh Indonesia. Untuk itu, kami meminta agar pemerintah segera melakukan kajian dan menerbitkan peraturan pemerintah serta membuka moratorium pemekaran atau pembentukan DOB,” ujar Andy dalam rapat kerja Komite I dengan Menteri Dalam Negeri di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Dalam rapat tersebut, Anggota DPD RI Frits Tobo Wakasu turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai bahwa penutupan moratorium pemekaran atau pembentukan DOB dapat menghambat kemajuan masyarakat di berbagai bidang. Menurutnya, evaluasi kesiapan daerah pemekaran sangat penting dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah. “Pemerintah harus segera membuka moratorium pemekaran agar daerah dapat berbenah dan mempersiapkan daerahnya. Pemekaran perlu dilakukan, terutama untuk daerah perbatasan yang merupakan garda terdepan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” harap senator dari Papua Selatan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 337 calon DOB yang telah diajukan. Namun, sejak moratorium diberlakukan pada tahun 2014, tidak ada



Ketua Komite I DPD RI Andy Sofyan Hasdam dan Wamendagri Bima Arya usai menandatangani kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

satu pun DOB yang berhasil dibentuk karena kendala anggaran. “Presiden, sebagai Pimpinan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), menghentikan pemekaran daerah karena terbatasnya anggaran,” terang Tito. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kesiapan keuangan negara dan skala prioritas sebelum membuka moratorium.

Selain itu, Tito menyarankan agar DPD RI menjalin komunikasi yang intensif dengan Menteri Keuangan untuk mendapatkan data dan penjelasan terkait kondisi fiskal negara. “Jika ingin ada langkah konkret, DPD RI dapat langsung berkomunikasi dengan presiden dan wakil presiden,” kata Mendagri. Langkah ini dianggap penting untuk mempercepat keputusan terkait pembukaan moratorium pemekaran daerah.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan tersebut telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 dengan nomor urut 32. Andy menjelaskan bahwa DPD RI menjadi bagian penting dalam penyusunan naskah akademik untuk RUU ini.

“Komite I DPD RI dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemda ini menemukan berbagai persoalan yang memerlukan jalan keluar. Kami sangat berharap RUU Perubahan Pemda ini dapat dibahas dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2025,” ujar Andy mengakhiri rapat dengan penuh harapan. (\*)

# MK Hapus *Presidential Threshold* Sultan Usulkan Capres Independen

Rini Sumarni

Penulis

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Keputusan ini tertuang dalam putusan perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, di ruang sidang MK pada Kamis (2/1). Dengan putusan ini, partai politik dapat mencalonkan presiden tanpa persyaratan minimal perolehan suara.

**M**enanggapi ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menyambut baik keputusan MK tersebut. Dalam keterangannya sesaat setelah keluarnya putusan tersebut, Sultan mengungkapkan bahwa DPD RI merupakan salah satu pihak yang menggugat Pasal 222 UU Pemilu. “Kami atas nama lembaga DPD RI termasuk menjadi pihak yang menggugat pasal ini ke MK,” ujarnya di Gedung DPD RI.

Sultan menilai keputusan MK sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan proses pencalonan presiden dilakukan secara lebih ter-



Ketua DPD RI saat memimpin Sidang Paripurna DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

buka. Ia menyebutkan bahwa dengan *presidential threshold* nol persen, partai politik akan lebih fokus pada proses kaderisasi dan menyiapkan calon pemimpin nasional terbaik.

Selain itu, Sultan mengusulkan adanya wacana pencalonan presiden secara independen atau non-partisan. Menurutnya, perlu ada langkah untuk membuka jalur independen dalam sistem politik pemilihan presiden, meskipun saat ini UUD 1945 hanya memberi kewenangan kepada partai politik untuk mencalonkan presiden. Ia mencontohkan model seperti di Amerika Serikat yang memberikan ruang bagi calon independen.

Sultan juga menekankan pentingnya keadilan dan persamaan hak politik bagi seluruh warga negara. “Prinsip demokrasi tidak boleh dibatasi oleh aturan *presiden-*

*tial threshold* ataupun monopoli institusi politik tertentu,” tegasnya. Meski demikian, ia tetap menghormati konstitusi yang berlaku saat ini.

Lebih lanjut, Sultan mendorong kajian akademis mengenai jalur independen untuk pencalonan presiden. Ia menyebut keputusan MK sebagai langkah penting dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif dan mengatasi tantangan demokrasi internal partai politik yang belum sepenuhnya ideal.

Di akhir keterangannya, Sultan menyarankan agar sistem pemilihan presiden dan legislatif di Indonesia ditinjau ulang. Ia mengusulkan agar budaya musyawarah di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dihidupkan kembali, serta pelaksanaan pilpres dan pileg dilakukan secara terpisah untuk meningkatkan kualitas demokrasi nasional. (\*)



# Terobosan Konstitusional dalam Sejarah Perjalanan Demokrasi



Tamsil Linrung bersama Fahira Idris dan Edwin Pratana saat menghantarkan gugatan presidential threshold 20 persen ke MK tahun 2021 lalu. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Arso Pranoto Nugroho**

Penulis

**W**akil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurut Tamsil, langkah ini merupakan terobosan konstitusional yang sangat penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.

“Putusan MK mengubah pemilihan presiden (pilpres) menjadi ajang festival gagasan. Ini adalah stimulan bagi lahirnya pikiran-pikiran segar untuk membangun Indonesia dan mendorong regenerasi kepemimpinan yang sehat, dinamis, serta berkualitas,” ujarnya kepada media pada Sabtu, 4 Januari 2025.

Menurut Tamsil, penghapusan presidential *threshold* membuka ruang yang lebih luas bagi kepemimpinan nasional yang inklusif dan kompetitif. “Putra-putri terbaik bangsa kini

dapat tampil di gelanggang secara adil. Potensi terbaik bangsa memiliki kesempatan untuk berkontribusi membangun negara, terlepas dari besar kecilnya kekuatan partai politik pengusung,” ungkapnya. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki kompetensi dan integritas.

Tamsil juga menyoroti bahwa keputusan MK ini sejalan dengan perjuangan para senator di DPD RI. Pada tahun 2021, ia bersama sejumlah senator mengajukan gugatan di MK agar ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dihapuskan. “Meskipun keputusan ini bukan berdasarkan perkara yang kami ajukan, substansinya tetap sama, yakni membuka panggung kepemimpinan nasional seluas-luasnya,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan kemenangan bagi demokrasi yang substansial.

Keputusan MK dinilai Tamsil sebagai momentum penguatan partai politik sebagai institusi kaderisasi pemimpin bangsa. Dengan hilangnya ambang

batas pencalonan presiden, partai politik memiliki ruang lebih luas untuk mempromosikan kader terbaik mereka. “Partai politik kini memiliki tantangan untuk mencetak pemimpin yang kompeten, visioner, dan berintegritas. Ini juga menjadi dorongan agar partai-partai lebih serius menjalankan fungsi utama mereka,” katanya.

Selain itu, Tamsil menilai keputusan ini sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya stabilitas, kerukunan, dan persatuan nasional pasca kontestasi. “Ketika kompetisi politik tidak lagi terpolarisasi secara ekstrem, rekonsiliasi antar elemen politik akan menjadi lebih mudah. Dengan kontestasi yang lebih inklusif, peluang untuk bersatu membangun bangsa semakin besar,” katanya. Ia berharap keputusan ini dapat meredam polarisasi politik yang selama ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia.

Lebih jauh, Tamsil menjelaskan bahwa keputusan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional. Dengan sistem yang lebih terbuka, presiden terpilih akan memiliki dukungan yang lebih luas dari masyarakat. “Keputusan ini memberikan rakyat lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpin. Suara dan aspirasi mereka akan lebih terwakili dalam kompetisi politik yang terbuka,” ujarnya sembari mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya pemangku kepentingan, untuk menghormati dan menjalankan putusan MK ini sepenuhnya. (\*)

# Momentum Perbaikan Sistem Demokrasi Indonesia

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**K**etua DPD RI periode 2019–2024, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan apresiasi atas perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya mengabulkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential *threshold* (PT) dari 20 persen menjadi 0 persen. Langkah ini, menurut LaNyalla, merupakan perkembangan penting setelah 33 kali MK menolak gugatan terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Perubahan pandangan Hakim MK tentu harus diapresiasi, terutama dalam putusan terbaru ini yang demi menghindari kemunduran demokrasi akibat dominasi partai politik yang berkelompok,” ujarnya, Jumat (3/1/2025).

LaNyalla menegaskan bahwa penghapusan PT 20 persen harus menjadi momentum untuk menata ulang sistem demokrasi Indonesia agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila, katanya, mengedepankan musyawarah mufakat dan menghindari jebakan biaya politik tinggi serta popularitas semu yang dapat difabrikasi. “Bangsa ini harus kembali ke sistem Pancasila, menghasilkan perwakilan yang diisi oleh para hikmat untuk

memilih putra-putri terbaik bangsa menjadi pemimpin nasional,” ungkapnya.

Menurut LaNyalla, perubahan sistem demokrasi perlu diikuti dengan revisi terhadap undang-undang terkait, terutama UU Pemilu dan sistem tata negara. Ia mengusulkan agar pemilihan presiden tidak dilakukan secara langsung, tetapi oleh MPR RI sebagai lembaga tertinggi yang diisi oleh para hikmat, bukan hanya perwakilan partai politik. “Pemilihan langsung hanya menghasilkan biaya tinggi dan batu ujinya adalah popularitas, bukan integritas, intelektualitas, atau moralitas. Ini tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila,” tegasnya.

Ia juga mengkritik sistem pemilu langsung yang menyamakan nilai suara tanpa mempertimbangkan kapasitas pemilih. “Suara seorang guru besar sama dengan suara mahasiswa semester satu. Ini menciptakan batu uji yang kurang relevan untuk memilih pemimpin nasional,” jelas LaNyalla. Oleh karena itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap UU Pemilu dan sistem tata negara agar menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas melalui proses seleksi oleh MPR RI.

Lebih lanjut, LaNyalla menyebutkan keputusan MK sebagai pintu masuk untuk kembali ke konstitusi asli bangsa. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal memiliki semangat untuk kembali pada nilai-nilai



**AA LaNyalla Mahmud Mattalitti**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pancasila dan UUD 1945, dapat mendorong elemen bangsa untuk memanfaatkan momentum ini guna memperbaiki sistem pemilu dan tata negara. “Bukan kembali ke Orde Lama atau Orde Baru, tetapi benar-benar menerapkan pikiran para pendiri bangsa yang sesuai dengan watak asli Nusantara,” katanya.

LaNyalla juga mengingatkan bahwa DPD RI pernah mengajukan gugatan serupa pada Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun 2021-2022, Jumat 18 Februari 2022. Namun, MK kala itu menolak gugatan tersebut. “Kini, dengan kesadaran MK, kita semua juga harus sadar dan bersatu untuk memperbaiki sistem demokrasi kita,” tandasnya.

Keputusan MK, menurut LaNyalla, memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk kembali ke sistem demokrasi yang lebih sehat, terarah, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan pentingnya menggunakan momentum ini untuk memperbaiki sistem pemilu demi masa depan bangsa yang lebih baik. (\*)

Pro dan Kontra PPN 12 Persen,

# Sultan: Tak Puas, Gugat Saja ke MK

Betria Eriani

Penulis

Pemerintah telah menetapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2025. Dasar pemerintah menaikkan PPN yang sebelumnya 11 persen adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kebijakan pemerintah menaikkan PPN tersebut telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, termasuk dari kalangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menilai kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen merupakan perintah UU yang sangat dilematis bagi pemerintah.

Meski demikian, menurut mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu, keputusan pemerintah untuk memberlakukan PPN 12 persen pada produk tertentu sudah tepat dan bijaksana. Dalam konteks ini, pemerintah sudah berupaya keras untuk menyiasatinya dengan pendekatan yang lebih ramah kepada masyarakat.

“Harus kita akui bahwa pajak yang dianggap terlampau tinggi merupakan persoalan sosial dan ekonomi yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Oleh karenanya, sejak awal kami mengusulkan agar sebaiknya kebijakan



Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin didampingi Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai saat menjawab pertanyaan media. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

ini ditunda hingga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat kembali pulih,” ujar Sultan kepada awak media baru-baru ini.

Dia mengatakan, jika UU HPP tersebut tidak dijalankan pemerintah, tentu akan menjadi preseden buruk bagi kewajiban konstitusional presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun, jika masih terdapat pihak yang keberatan, dia sarankan agar melakukan *judicial review* terhadap UU HPP ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Secara terpisah, Senator Hilmy Muhammad cukup memahami pemerintah membutuhkan anggaran yang besar dalam menjalankan program-programnya, seperti program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan ditambah lagi kabinet yang gemuk, yang menyedot anggaran besar.

“Kita paham, kebutuhan anggaran untuk makan bergizi, ketahanan pangan, tetapi apa tidak ada sumber pendapatan lainnya? Paling enak memang meminta kepada rakyat. Sementara kita punya sumber daya alam, masih ada penyalahgunaan anggaran, dan sebagainya. Di sisi lain, kita perlu berhemat, memberi sanksi keras bagi pengemplang pajak dan penyelundup,” tegas Hilmy.

Karena itu, dia mengusulkan segera dibentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan memiliki GBHN, kebijakan disusun dalam jangka panjang dan tidak membebani rakyat. Kebijakan yang dibuat pun bisa berpihak kepada rakyat dan dalam jangka panjang. Tanpa GBHN akan ada program kejutan setiap lima tahun yang bahkan tidak berpihak pada rakyat. (\*)



Anggota DPD RI Hilmy Muhammad.  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Orkestrasi Besar Swasembada Pangan:

## Mengembalikan Kejayaan Negeri Agraris



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung acara Mukhtar ke-6 Serikat Tani Islam Indonesia (STII). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Helena Agustina Fernandez Ojan**

Penulis

**W**akil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyerukan perlunya orkestrasi besar dalam melibatkan seluruh elemen bangsa demi keberhasilan mega proyek swasembada pangan. Menurutnya, masyarakat Indonesia, yang telah lama hidup sebagai bangsa agraris, memiliki keunggulan alami dalam memahami sektor pertanian. Namun, dukungan nyata dari pemerintah menjadi kunci untuk menjadikan potensi ini sebagai kekuatan strategis.

Dalam acara Mukhtar ke-6 Serikat Tani Islam Indonesia (STII) yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/12/2024), Tamsil menegaskan kembali komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo

dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. Ia mengutip pernyataan Presiden yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah wibawa bangsa. "Swasembada pangan adalah misi strategis, bukan sekadar target teknis," ujar Tamsil, menegaskan pentingnya fondasi pangan bagi martabat dan kontinuitas bangsa.

Menurut Tamsil, target swasembada pangan tidak mungkin tercapai dengan pendekatan konvensional. Ia menekankan perlunya terobosan dan kolaborasi yang melibatkan masyarakat, terutama organisasi tani seperti STII. Ia menyebut inovasi yang berkembang di kalangan petani, seperti padi trisakti, sebagai contoh nyata kreativitas masyarakat. Namun, Tamsil juga mengkritik lambannya respons pemerintah terhadap inovasi tersebut,

yang menurutnya perlu lebih proaktif dan responsif.

"Pemerintah harus jemput bola. Stimulus, insentif, hingga kebijakan yang mendukung sangat diperlukan," ujar Tamsil. Baginya, perlindungan terhadap sektor pertanian, termasuk proteksi dari kebijakan impor yang melemahkan daya saing petani, adalah wujud keberpihakan konkret yang harus dilakukan. Dukungan seperti akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas juga menjadi agenda mendesak.

Tamsil percaya, habitus agraris bangsa ini tidak hanya mempermudah proses adaptasi teknologi dan inovasi baru, tetapi juga menciptakan peluang besar untuk mencapai kemandirian pangan. Ia menyebut bahwa swasembada pangan harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan semua lapisan masyarakat, dari pemerintah hingga organisasi tani, demi terciptanya ekosistem pertanian yang berkelanjutan.

Sebagai wakil rakyat, Tamsil memastikan DPD RI akan terus memfasilitasi sinergi antara masyarakat dan pemerintah. "Kami akan memastikan bahwa suara petani terdengar, inovasi mereka diadopsi, dan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada rakyat," tutupnya. Dengan orkestrasi yang terarah, ia optimistis kebangkitan negeri agraris bukan sekadar mimpi, tetapi kenyataan yang bisa dicapai bersama. (\*)

# Paparan GKR Hemas tentang Peran Perempuan: Dari Domestik hingga Politik

**Muhamad Fathoni**

Penulis

**W**akil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mengulas perjalanan panjang peran perempuan Indonesia dalam seminar nasional Jejak Peradaban #1 yang berlangsung di Yogyakarta pada Sabtu, (14/12/24). Mengangkat tema “Perempuan di Ruang Domestik, Publik, dan Politik,” Ratu Hemas menegaskan bahwa perempuan Indonesia telah memainkan peran signifikan sejak masa sebelum kemerdekaan, dengan menunjukkan keberanian dan kepemimpinan yang menjadi inspirasi lintas generasi.

Dalam paparannya, Ratu Hemas menyoroti peran Yogyakarta sebagai saksi sejarah Kongres Perempuan

pertama pada 22 Desember 1928. Kongres tersebut menjadi awal lahirnya berbagai organisasi perempuan yang mendorong perubahan sosial di Indonesia, sekaligus menjadi tonggak Hari Ibu yang diperingati setiap tahun. “Gerakan ini bukan hanya tentang hak, tetapi juga membangun fondasi martabat bangsa,” ujarnya.

Perjuangan perempuan tidak berhenti di masa lampau. Setelah amandemen UUD 1945 pada tahun 2000, hak perempuan semakin diakui melalui pasal 28H ayat 2 yang mengatur afirmasi bagi perempuan, lansia, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Ratu Hemas juga mencatat pentingnya sejumlah undang-undang seperti representasi minimal 30 persen perempuan dalam politik, UU PKDT 2004, UU Anti-Trafficking 2007, dan UU TPKS 2022 sebagai langkah konkret penghapusan diskriminasi.

Menurut Ratu Hemas, perempuan harus memainkan peran strategis dalam tiga dimensi yang saling melengkapi: domestik, sosial-publik, dan politik. Ia menekankan pentingnya keterlibatan perempuan bukan hanya dalam angka, tetapi juga dalam pengambilan kebijakan yang berpi-

hak pada kepentingan rakyat. Kepemimpinan perempuan, katanya, adalah wujud nyata dari keberanian untuk membuat perubahan.

Dalam forum yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyampaikan apresiasi terhadap Kraton Yogyakarta yang menggelar seminar nasional, bedah buku “GKR Hemas, Ratu di Hati Rakyat,” dan pameran bertema pemberdayaan perempuan. Arifah menilai kegiatan ini menunjukkan komitmen Keraton dalam mendorong diskusi penting terkait perlindungan perempuan dan anak.

Gusti Kanjeng Ratu Bendara, sebagai penanggung jawab acara, menambahkan bahwa seminar ini bertujuan menyampaikan pentingnya peran perempuan kepada generasi muda. Ia menggarisbawahi bahwa perempuan mampu mengambil peran di berbagai ruang yang sebelumnya dianggap sebagai domain laki-laki, termasuk kepemimpinan dalam politik dan pengambilan kebijakan strategis.

Melalui acara ini, Keraton Yogyakarta tidak hanya menghidupkan semangat sejarah, tetapi juga menegaskan pentingnya kesinambungan perjuangan perempuan di masa depan. Dengan sinergi antara tradisi dan inovasi, kontribusi perempuan di berbagai bidang dapat terus membawa perubahan positif bagi bangsa. (\*)

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam seminar bertema “Perempuan di Ruang Domestik, Publik dan Politik”, di Yogyakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# DPD RI: Kaji Ulang Kategori PSN



Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai saat memimpin sidang paripurna. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Theresia Oktavina**

Penulis

**W**akil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai mengatakan bahwa DPD RI sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, berkepentingan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah, termasuk proyek strategis nasional (PSN), seperti di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Provinsi Banten.

Adanya permasalahan dan aspirasi masyarakat terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum selesai perlu menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk mengkaji ulang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

“Pemerintah perlu mengkaji ulang dengan mempertimbangkan fokus arahan Presiden Prabowo Subianto

terhadap empat kategori PSN yang mendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi, dan program *giant sea wall* untuk Jakarta dan Pantai Utara Jawa,” kata Yorrys, saat memimpin Sidang Paripurna DPD RI Masa II Tahun 2024-2025 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (11/12/24).

Dalam sidang paripurna tersebut juga diputuskan beberapa hal. Salah satunya agar pemerintah segera menaikkan tunjangan kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disuarakan oleh Komite I DPD RI yang mendesak percepatan proses peningkatan kesejahteraan ASN melalui peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap menjadi 100 persen.

Selain peningkatan kesejahteraan ASN, Komite I DPD RI mendorong Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI untuk mengangkat seluruh pegawai non ASN yang bekerja di instansi pemerintah sebagai ASN pada tahun 2024. Setelah pandangan yang disampaikan Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam itu, kemudian menjadi keputusan DPD RI. (\*)



Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam menyampaikan pandangan komitennya dalam sidang paripurna. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# JANGAN ADA PUNGLI dalam Program Makan Bergizi

**Betria Eriani**

Penulis

**K**etua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, memberikan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi di sekolah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus bebas dari pungutan liar (pungli) atau biaya tambahan yang dibebankan kepada orang tua murid. Insiden viral terkait dugaan pungli, seperti kewajiban membeli wadah makan senilai Rp30.000 untuk program makan siang gratis, menjadi perhatian serius Filep. “Dukungan kita pada maksud baik pemerintah jangan sampai dicerai oleh oknum tertentu. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Filep menekankan pentingnya antisipasi penyalahgunaan wewenang, seperti pungli atau penyelewengan anggaran, yang dapat mencederai tujuan program ini. Dengan anggaran sebesar

Rp71 triliun, program ini membutuhkan pengawasan ketat agar efisien, efektif, dan tepat sasaran. Ia juga mendorong peran semua pihak, mulai dari sekolah, pemerintah daerah, hingga masyarakat, untuk bersinergi dalam pengawasan dan pembinaan program ini.

Menurut Filep, Badan Gizi Nasional sebagai koordinator harus memastikan tata kelola yang transparan dan profesional. Ia mengingatkan bahwa korupsi dalam program sebesar ini tidak hanya akan menghentikan program, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik. Sosialisasi yang masif dan terintegrasi diperlukan agar semua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing, termasuk siswa, sekolah, dan orang tua.

Senada dengan Filep, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, juga mengemukakan insiden pungli yang viral di media sosial. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program yang secara resmi dimulai pada 2 Januari 2025. “Ada banyak celah yang bisa menjadi sumber persoalan jika tidak diawasi dengan benar,” ujarnya.

Dailami mengkritisi pemangkasan anggaran menjadi Rp10 ribu per porsi dari Rp15 ribu sebelumnya. Menurut, selain

memastikan makanan gratis, pemerintah juga harus memperhatikan kandungan gizi dan cita rasa menu. “Sulit membayangkan menu bergizi dan berkualitas dengan anggaran sebesar itu,” tambahnya.

Ia juga menyoroti tantangan dalam penyediaan makanan di berbagai wilayah. Kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya mungkin dapat memenuhi kebutuhan ini dengan mudah. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk daerah pedalaman yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan akses penyediaan makanan.

Program Makan Bergizi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pengawasan, tata kelola yang baik, serta keterlibatan semua pihak. Dengan penanganan yang serius, program ini tidak hanya memberikan makan siang, tetapi juga menanamkan semangat kebersamaan kepada generasi penerus bangsa. (\*)



**Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



**Wakil Ketua Komite III DPD RI Dailami Firdaus**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Wacana Libur Sekolah di Ramadan Ini Tanggapan Anggota DPD RI

Didin Saputra

Penulis

**P**emerintah mewacanakan libur sekolah selama bulan Ramadan, yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Erni Daryanti, menyatakan dukungannya terhadap wacana ini, tetapi menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi meningkatkan fokus siswa dalam menjalankan ibadah, tetapi keberagaman budaya dan keyakinan di Indonesia harus menjadi pertimbangan utama.

“Kearifan lokal di setiap daerah memiliki pendekatan berbeda terhadap aktivitas Ramadan. Karenanya, kebijakan ini harus dirancang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan agar hasilnya optimal,” ujar Erni. Ia menambahkan, pemerintah perlu me-

astikan rencana tersebut dapat mendukung kualitas ibadah siswa tanpa mengabaikan kebutuhan pembelajaran akademik.

Saat ini, banyak pesantren yang sudah menerapkan libur selama Ramadan, sementara sekolah umum sering menggunakan bulan Ramadan untuk mengadakan kegiatan seperti pesantren kilat. Erni menggarisbawahi pentingnya pemerintah mendukung program keagamaan baik di sekolah maupun luar sekolah agar pembinaan karakter siswa tetap terjaga, bahkan di tengah libur Ramadan.

Senada dengan Erni, Anggota DPD RI Hilmy Muhammad menyambut baik wacana ini. Menurutnya, memberikan satu bulan untuk menumbuhkan spiritualitas siswa adalah langkah yang bijak. “Dalam setahun ada 12 bulan, mengalokasikan satu bulan untuk memperkuat karakter dan ibadah anak-anak sangat berarti,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hilmy.

Namun, Gus Hilmy mengakui bahwa kebijakan ini lebih mudah diterapkan di pesantren dan pedesaan dibandingkan di perkotaan, di mana banyak orang tua khawatir tidak dapat mengawasi anak-anak mereka karena kesibuk-

an. Ia menyarankan agar sekolah menawarkan program sekolah pesantren sebagai alternatif, seperti yang pernah dilakukan pada era Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada program ini, siswa dapat mengikuti pembelajaran berbasis agama dengan pendekatan praktis, seperti tugas harian yang dipantau guru. Gus Hilmy menilai metode pembelajaran pesantren yang telah teruji dapat memberikan teladan langsung kepada siswa, membentuk karakter dengan cara yang lebih efektif dibandingkan pembelajaran teoretis semata.

Dengan sinergi antara pembelajaran formal dan pendidikan karakter berbasis agama, wacana libur sekolah Ramadan berpotensi menjadi solusi yang harmonis. Program ini tidak hanya menumbuhkan kedekatan spiritual, tetapi juga mendukung pembentukan generasi muda yang tangguh dan berkarakter, tanpa mengorbankan aspek akademik. (\*)



**Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



**Anggota DPD RI Hilmy Muhammad**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Harmoni Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**K**etua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2025 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024). Dalam kesempatan tersebut, Sultan menekankan pentingnya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan peta jalan pembangunan nasional berjalan seirama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah melalui Bappenas yang menyelenggarakan Musrenbangnas lebih awal. Ini menjadi tanda optimisme dalam memaksimalkan agenda pembangunan nasional,” ungkap Sultan. Ia juga menyoroti bahwa tradisi Musrenbang menjadi ruang penting bagi pendekatan *bottom-up*, di mana aspirasi daerah dapat diselaraskan dengan rencana pemerintah pusat.

Sultan menegaskan perlunya kolaborasi lebih erat antara Bappenas dan Bappeda dalam merancang koordinasi pembangunan. “Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi disorientasi antara pusat dan daerah. Sinergi yang kuat akan meminimalkan kesenjangan dan memastikan setiap agenda pembangunan terarah,” ujarnya.



Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di sela-sela acara Musrenbangnas 2025. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Lebih jauh, Sultan mendorong agar kebutuhan pembangunan daerah yang diidentifikasi melalui Musrenbang tingkat desa dan daerah benar-benar menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana nasional. Menurutnya, masyarakat daerah memiliki pemahaman lebih baik mengenai kebutuhan lokal yang harus diakomodasi oleh pemerintah pusat.

Pada kesempatan terpisah, Sultan juga menyoroti pentingnya pemerintah daerah untuk memaksimalkan belanja daerah, terutama dengan memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan hampir Rp1.000 triliun alokasi Transfer Pusat ke Daerah (TKD) tahun depan, Sultan optimistis dampaknya akan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan layanan publik di daerah.

Namun, ia mengingatkan

bahwa alokasi TKD saja tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan daerah. Pemerintah daerah harus cermat dalam menyusun anggaran, menyeimbangkan antara belanja publik dan pengembangan pendapatan asli daerah. “Keberhasilan pembangunan juga terletak pada kemampuan daerah menerjemahkan program pusat, seperti Makan Bergizi Gratis dan pemberdayaan dana desa,” tegasnya.

Sultan menutup dengan harapan bahwa pendekatan fiskal pro-daerah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Dengan sinergi pusat-daerah yang kuat, target penurunan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal, membawa Indonesia lebih dekat pada visi 2045. (\*)



## Sultan Dorong Pemerintah Perbanyak Koperasi Produksi

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menjawab pertanyaan wartawan saat menghadiri Munas Dekopin Tahun 2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Fandi Tri Prayogo**

Penulis

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah mengembangkan industri perkoperasian Indonesia dengan manajemen yang modern dengan pendekatan digital. Terutama mengembangkan lebih banyak koperasi produksi di setiap daerah bahkan desa.

“Kami mendorong pemerintah memperbanyak koperasi produksi di tingkat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Koperasi produksi dapat menjadi pendukung utama program-program andalan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis hingga program transmigrasi,” ujar Sultan kepada awak media, usai menghadiri

Munas Dekopin Tahun 2024, di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Menurutnya, koperasi produksi perlu dibangun bersama oleh beberapa kementerian dan lembaga teknis, bukan hanya oleh Kementerian Koperasi. Agar koperasi dapat tumbuh sebagai mesin ekonomis di sektor pertanian, perikanan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah.

Agar lebih efektif, mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu menyarankan bahwa koperasi harus dikembangkan secara gotong royong lintas sektor, naik kementerian pertanian, perikanan, kondisi dan tentunya kementerian koperasi dan UMKM. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan kapasitas manajerial koperasi dengan melibatkan talenta-talenta muda dan pen-

dekatan digitalisasi.

Sultan mencontohkan, di beberapa negara maju, seperti New Zealand, koperasi produksi memiliki valuasi bisnis yang justru lebih unggul daripada korporasi bisnis lainnya. “Di Indonesia, kita sudah memiliki percontohan koperasi produksi di beberapa daerah. Di Jawa Barat misalnya ada koperasi susu sapi yang sudah cukup baik. Ke depan kita perlu mengembangkan koperasi produksi dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi,” terangnya.

Selain itu, Ketua DPD RI ke-6 itu berharap Musyawarah nasional dewan koperasi Indonesia kali ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan gagasan dan inovasi dalam pengembangan koperasi Indonesia yang maju, produktif dan modern. (\*)

# Senator Cerint Serukan Prioritas Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

**Hestiana Kiftia Sari**

Penulis

**S**enator Perwakilan Sumatera Barat, Cerint Iralloza Tasya, kembali menyuarakan pentingnya kesejahteraan tenaga kesehatan (Nakes) di Indonesia. Dalam sebuah pertemuan dengan Komite IV DPD RI di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini, Cerint mengajak semua pihak untuk memprioritaskan nasib Nakes yang selama ini menjadi ujung tombak dalam sistem kesehatan nasional, terutama di tengah tantangan berat pandemi yang telah melanda dunia. Menurutnya, perhatian lebih terhadap Nakes adalah langkah mendasar untuk memperkuat layanan kesehatan di Indonesia.

Senator muda asal Sumatera Barat itu menegaskan perlunya pemerintah segera mengimplementasikan kenaikan tunjangan untuk tenaga kesehatan. Ia menyebutkan bahwa tunjangan yang selama ini diterima Nakes dianggap masih jauh dari memadai, jika dibandingkan dengan peran vital yang mereka jalankan se-

tiap hari. “Tenaga kesehatan tidak hanya melayani pasien, tetapi juga menghadapi risiko besar terhadap keselamatan mereka sendiri. Ini harus dihargai dengan kebijakan yang adil dan layak,” ujarnya.

Kenaikan tunjangan ini dinilai semakin mendesak, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan upah pekerja sebesar 6,5% serta penambahan tunjangan sertifikasi menjadi dua juta rupiah untuk guru. Cerint menekankan bahwa sektor kesehatan juga harus mendapat perhatian yang seimbang, mengingat pentingnya peran Nakes dalam menjaga stabilitas kesehatan masyarakat. Dengan tunjangan yang lebih baik, diharapkan para tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada tugas mereka dan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

Kondisi di lapangan yang dipantau media ini, menunjukkan bahwa banyak Nakes,

terutama di daerah terpencil dan wilayah perbatasan, masih menghadapi berbagai keterbatasan. Selain tunjangan yang rendah, mereka juga harus bekerja dalam kondisi minim fasilitas, dengan jumlah tenaga yang tidak sebanding dengan beban kerja yang ada. Banyak Nakes di puskesmas daerah terpencil, misalnya, bekerja hingga di luar jam tugas karena keterbatasan tenaga pendukung. Hal ini berdampak pada kualitas layanan yang diberikan, meskipun dedikasi mereka tidak diragukan lagi.

“Kesejahteraan itu bukan hanya soal angka dalam penghasilan, tetapi juga soal pengakuan dan penghargaan terhadap dedikasi serta pengorbanan mereka,” tambahnya.

Selain itu, Cerint menyebutkan pentingnya peningkatan fasilitas pendukung di layanan kesehatan. Ia mendorong pemerintah untuk memperhatikan penyediaan alat medis yang memadai dan peningkatan kapasitas pelatihan bagi Nakes di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini akan membantu para tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka, sehingga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. (\*)



**Senator Sumbar Cerint Iralloza Tasya**  
(Foto Perwakilan DPD RI Sumbar)

# Pembentukan Negara Palestina, Sultan Minta Indonesia Proaktif



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (kedua dari kanan) bersama Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Wapres RI Gibran Rakabuming Raka (paling kanan) dan Menlu Sugiono (paling kiri). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Arso Pranoto Nugroho**

Penulis

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil bagian dalam konferensi internasional pembentukan negara Palestina yang diinisiasi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Pemimpin de-facto Kerajaan Arab Saudi Muhammad Bin Salman.

“Indonesia harus proaktif untuk menjadi bagian yang signifikan dari upaya diplomatik yang penting ini. Kami percaya peran Indonesia sangat dinantikan oleh Prancis dan Arab Saudi sebagai inisiator dan ketua bersama konferensi tersebut. Ini sebagai wujud dukungan dan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Palestina dari jajahan zionis Israel,” kata Sultan,

Sabtu (7/12/2024).

Sultan mengatakan peran diplomatik Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia telah menemukan momentumnya saat ini. Meski demikian, Sultan meminta agar Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mengkaji secara detail proposal diplomatik kemerdekaan Palestina yang akan diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi.

Dia mengakui komitmen Indonesia selama ini dalam memperjuangkan nasib bangsa Palestina semakin solid dan konsisten pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya inisiatif Presiden Prancis dan Putra Mahkota Arab Saudi tersebut patut disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia.

Partisipasi Indonesia dalam konferensi pembentukan negara Palestina, kata

Sultan, akan menjadi penentu bagi tercapainya tujuan solusi dua negara pada konflik Palestina-Israel. “Suasana geopolitik dan dukungan PBB saat ini sangat memungkinkan untuk tercapainya hasil konferensi yang positif. Mari kita do’akan agar Palestina segera mendapatkan pengakuan internasional sebagai sebuah negara yang berdaulat dan damai,” harapnya.

Diketahui, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa ia dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman akan menjadi ketua bersama sebuah konferensi tentang pembentukan negara Palestina. Konferensi tersebut akan digelar pada bulan Juni mendatang. “Kami telah memutuskan untuk menjadi ketua bersama sebuah konferensi untuk kedua negara tersebut pada bulan Juni tahun depan,” kata Macron. (\*)

# JCI Berkontribusi Bentuk Karakter Pemuda Indonesia

Helena Agustina Fernandez Ojan

Penulis

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menerima kunjungan President World 2024 Junior Chamber International (JCI), Kaveen K, dan rombongannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 11 Desember 2024. Dalam pertemuan tersebut, Sultan menekankan peran vital organisasi kepemudaan dalam membentuk calon pemimpin bangsa dan menjadi wadah bagi konsolidasi gagasan serta inovasi pemuda.

Sultan mengatakan bahwa organisasi kepemudaan harus mengedepankan nilai-nilai dan prinsip demokrasi serta regenerasi untuk menjadi organisasi yang berdampak positif pada masyarakat. “Kami mengapresiasi JCI yang telah berkontribusi besar dalam membentuk karakter pemuda Indonesia dan global selama ini. Kami mengetahui JCI memiliki komitmen pada demokrasi dan regenerasi kepemimpinan organisasi kepemudaan,” ucap Sultan, yang juga mantan aktivis Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Menurut Sultan, di era digital saat ini, pemuda harus mampu membaca segala kemungkinan



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama President World 2024 Junior Chamber Internasional (JCI) Kaveen K. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

“**Kami mengapresiasi JCI yang telah berkontribusi besar dalam membentuk karakter pemuda Indonesia dan global selama ini. Kami mengetahui JCI memiliki komitmen pada demokrasi dan regenerasi kepemimpinan organisasi kepemudaan.**”

**Ketua DPD RI,  
Sultan B Najamudin**

dan ketidakpastian. “Pemuda Indonesia harus mampu menerjemahkan kehendak zaman. Artinya, perlu memiliki *world-wide minded* yang mampu melihat peluang dan menjalin

kolaborasi bersama pemuda di level global,” pesannya.

Dalam sambutannya, Kaveen K menyatakan kekagumannya terhadap kepemimpinan Sultan dan menyampaikan selamat atas terpilihnya sebagai ketua DPD RI. “Indonesia sangat beruntung dengan kehadiran kepemimpinan muda di level nasional. JCI telah memiliki struktur di banyak daerah untuk berkolaborasi dengan semua elemen bangsa Indonesia,” tutur Kaveen.

Pertemuan ini menjadi platform penting dalam menggalang dukungan dan kerjasama antar generasi muda di Indonesia dengan pemuda global untuk menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digitalisasi. (\*)



## Pererat Silaturahmi Nasional untuk Cipta Sinergi yang Kuat

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung (dua dari kiri) dan Wamen Agama Muhammad Syafi'i (dua dari kanan) dalam kegiatan bertajuk Silaturahmi Anak Bangsa. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**M. Fathoni**

Penulis

**W**akil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, bersama Wakil Menteri Agama, Muhammad Syafi'i, menghadiri acara Silaturahmi Anak Bangsa yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) di Gedung DPD RI, Jakarta, pada Desember lalu. Acara ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai persatuan dan kebangsaan serta menghadapi tantangan bangsa ke depan.

Dalam kegiatan tersebut, Tamsil Linrung mengungkapkan pentingnya mewujudkan "Indonesia Berkah

2045", yang dia artikan sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan. "Demikianlah Indonesia, harus senantiasa dinaungi keberkahan. Jangan menunggu 2045. Terapkan hari ini dan selanjutnya dalam kehidupan pribadi dan komunitas, maka tercipta dalam kehidupan berbangsa dan peradaban," ucap Tamsil.

Muhammad Syafi'i menambahkan, "Silaturahmi ini merupakan langkah nyata untuk menjembatani perbedaan dan memperkuat persaudaraan antar elemen." Ia juga menekankan pentingnya adaptasi dan kolaborasi antar elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi kemajuan Indonesia.

Tamsil juga mengutip falsafah Jawa yang mendukung visi Indonesia Berkah, yaitu *Gemah Ripah Loh Jinawi dan Toto Tentrem Kerto Raharjo*, yang artinya kondisi masyarakat yang subur makmur serta wilayah yang tertib dan sejahtera. "Aspek regulasi perlu kita perkuat agar sistem negara kita mendukung terwujudnya Indonesia berkah ini," tambahnya.

Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia berharap kegiatan silaturahmi ini dapat menjadi langkah awal dalam mempererat silaturahmi nasional dan menciptakan sinergi yang kuat antara masyarakat dan lembaga negara untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. (\*)

# Sultan Puji Sikap Kritis Presiden Prabowo di KTT D8



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin berbincang dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Theresia Oktavina**

Penulis

**D**ewan Perwakilan Daerah (DPD) mengapresiasi dan memuji keberanian Presiden Prabowo Subianto dalam mengkritisi kenyataan instabilitas politik di dunia Islam di konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Development 8 (D8) di Kairo, Mesir, beberapa waktu yang lalu.

“Pernyataan Pak Prabowo mengingatkan kita pada Peringatan Rasulullah Muhammad SAW tentang lemahnya umat Islam di akhir zaman. Kata Nabi, kelak jumlah umat Islam sangat banyak, tapi tidak bersatu, hingga seperti buih di lautan. Hanya sedikit pemimpin yang bersedia

untuk menyampaikan kebenaran dan kritis seperti yang dilakukan presiden Prabowo,” ujar Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Minggu (22/12/2024).

Pernyataan pedas Presiden Prabowo merupakan otokritik terhadap lambannya kepemimpinan negara-negara Islam, khususnya anggota D8 dalam mendukung dan menjaga stabilitas politik di beberapa negara Timur Tengah.

Sultan mengatakan meskipun pernyataan Presiden Prabowo tersebut sempat membuat Presiden dan delegasi Turkiye *walk out*, namun dia tidak memiliki resiko diplomatik yang serius antara Indonesia dan Turkiye. Sultan menghargai posisi Turkiye yang aktif memainkan peran geopolitiknya

secara langsung di beberapa negara Timur Tengah saat ini.

“Meskipun sebagian bangsa kita menyayangkan keputusan dan sikap Presiden Erdogan yang *walk out* saat Presiden Prabowo Subianto berbicara. Tapi semua pemimpin negara memiliki nilai yang diyakini benar dan motivasi yang berbeda-beda dalam setiap organisasi multilateral,” kata Sultan.

Dalam KTT D8 di Mesir itu, Indonesia ditetapkan sebagai Keketuaan KTT D8 tahun depan. Karena itu, Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mendorong pemerintah Indonesia untuk menyisipkan langkah-langkah strategis dan isu yang lebih konkrit sebagai Keketuaan KTT D8 di tahun depan. (\*)



## Senator Stefa Terima Aspirasi APDESI Sulut

Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow menerima aspirasi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Utara (Sulut). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Betria Eriani**

Penulis

**K**etua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Stefanus BAN Liow bertemu dengan perwakilan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) cabang Sulawesi Utara (Sulut) di Minahasa, baru-baru ini. Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas aspirasi dan kepentingan desa yang akan dijembatani ke pemerintah pusat.

Dalam pertemuan itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah APDESI Sulut, Luki Kasenda, menyampaikan beberapa poin penting yang berfokus pada penguatan desa, kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, serta optimalisasi peran

desa dalam pembangunan nasional dan daerah. Luki, yang juga menjabat sebagai Kades/Hukum Tua Kanonang Satu, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, ditemani oleh sejumlah pengurus lain termasuk Sekretaris DPD APDESI Sulut Wanly Lempoy dan Sekretaris DPC APDESI Kabupaten Minahasa Jemmy Suak.

Senator dari Sulut, Stefanus BAN Liow menanggapi positif aspirasi yang disampaikan oleh APDESI Sulut. Menurutnya, saat ini BULD DPD RI sedang memantau rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.

Stefanus, yang sering disapa Stefa, menambahkan bahwa telah terjadi ke-

samaan pandangan dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah dan kampus, serta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar, praktisi, dan asosiasi terkait desa. Diskusi-diskusi tersebut menekankan pentingnya penguatan otonomi desa dan peningkatan kesejahteraan para kepala desa serta perangkatnya.

Stefa juga mengungkapkan bahwa DPD RI telah mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa (Kemendes) untuk membahas lebih lanjut permasalahan dan aspirasi desa. “Kami akan sampaikan semua aspirasi ini dalam rapat bersama pemerintah tersebut,” ucap Stefa. (\*)

# Penting Solusi Preventif Cegah Banjir Bandang

Didin Saputra

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, mengunjungi korban banjir bandang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Jumat (20/12/2024). Dalam kunjungan tersebut, Penrad menyerahkan 1.000 paket bantuan dari Kementerian Sosial untuk meringankan beban 1.559 warga yang terdampak banjir di Desa Kota Tua dan Desa Simaninggir, Kecamatan Tano Timbangan Angkola.

Banjir bandang telah menghanyutkan empat rumah, merusak parah 20 rumah, dan menyebabkan kerusakan ringan pada 57 rumah lainnya. Selain itu, infrastruktur penting seperti satu gereja, dua masjid, dan infrastruktur air bersih juga terkena dampak.

Dalam pertemuan dengan warga, Penrad Siagian menekankan pentingnya solusi preventif untuk mencegah bencana serupa di masa depan. “Kita harus memikirkan bagaimana langkah preventif ke depan. Jika diperlukan relokasi, harus dipastikan ada tempat yang layak untuk masyarakat,” ujar Penrad.



Anggota DPD RI dari Sumatera Utara Pdt. Penrad Siagian berada ditempat penungsian warga. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Kita harus memikirkan bagaimana langkah preventif ke depan. Jika diperlukan relokasi, harus dipastikan ada tempat yang layak untuk masyarakat.**”

**Anggota DPD RI,  
Pdt. Penrad Siagian**

Penrad juga menyoroti perlunya alat berat untuk tetap berada di lokasi hingga pemulihan selesai. “Alat berat jangan ditarik dulu sebelum semua pekerjaan selesai. Kita harus memastikan

masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal tanpa ada hambatan,” katanya.

Selanjutnya, Penrad menegaskan bahwa status hutan lindung dan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) harus menjadi perhatian serius untuk memastikan mereka berjalan sesuai tujuan dan tidak menjadi ajang proyek pemerintah daerah. “Ini harus menjadi kerja bersama. Kita akan berjuang agar kampung-kampung kita dikeluarkan dari kawasan hutan, sehingga masyarakat dapat hidup dan berkembang tanpa ketakutan akan pengrusakan,” tutup Penrad. (\*)

# Senator Filep Apresiasi Prabowo Akan Pasang TV di Sekolah



TV Digital. (Foto SuaraPemerintah.ID)

**Mas Aryo Kristiyanto**

Penulis

**K**etua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang membidangi pendidikan Filep Wamafma mengapresiasi janji Presiden Prabowo Subianto yang berencana menyediakan televisi canggih di setiap sekolah di Indonesia. Janji ini disampaikan dalam peringatan Hari Guru di Velodrome, Jakarta Timur, di mana Presiden Prabowo berkomitmen untuk menginstalasi TV canggih dalam empat bulan ke depan untuk memfasilitasi distribusi materi pelajaran.

“Saya mengapresiasi janji Pak Presiden akan memberikan TV canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Saya berharap agar program ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan harus diawasi dalam realisasinya,” ujar Filep kepada media pada Kamis (19/12/2024).

Menurut Filep, pelaksanaan program pemasangan televisi ini membutuhkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, ketersediaan jaringan internet, dan sumber daya listrik. Masalah-masalah ini menunjukkan kompleksitas yang tidak sederhana dan

perlu dipertimbangkan secara serius dalam implementasinya.

Lebih lanjut, Filep menyampaikan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menunjukkan bahwa masih ada 57 juta penduduk Indonesia yang belum terjangkau oleh internet dan delapan persen wilayah Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik PLN. “Misalnya, Tanah Papua mendominasi wilayah yang belum teraliri listrik. Kesiapan infrastruktur dasar adalah prasyarat untuk memenuhi janji tersebut,” tegasnya.

Filep menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh sebelum pelaksanaan program ini. “Kita tahu bahwa dalam setiap pergantian rezim kepemimpinan, pasti ada kebijakan baru. Oleh karena itu, Menteri dan jajarannya harus melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan sebelumnya untuk memastikan bahwa perubahan konsep dan kebijakan pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kemampuan siswa, tenaga pengajar, dan kesiapan infrastruktur,” jelas Filep.

Dengan evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh informasi terbaru yang akan membantu dalam merancang strategi dan kebijakan yang taktis untuk memastikan efektivitas dan kesuksesan program pemasangan televisi canggih di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. (\*)



## DPD RI Dukung Pembentukan Holding UMKM di Daerah

**Fandi Tri Prayogo**

Penulis

**D**ewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membentuk sebuah *holding company* bagi UMKM dengan pendekatan komunitas di daerah.

Dukungan itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam sebuah pernyataan, Jumat (20/12/2024) di Jakarta. Menurutnya, pembentukan *holding* ini akan meningkatkan kapasitas bisnis dan proses formalisasi UMKM secara terstruktur di seluruh daerah, mengatasi tantangan yang sering dihadapi

UMKM seperti masalah modal dan pemasaran.

“Ini menjadi keluhan yang selalu kami terima saat berjumpa dengan pelaku UMKM di daerah. Banyak produk olahan UMKM yang mampu bersaing di skala rumah tangga namun kesulitan mendapatkan perizinan BPOM dan pembiayaan dari lembaga keuangan,” kata Sultan.

Ia menambahkan bahwa dengan pembentukan *holding*, akan tercipta *supply chain* yang efektif dan terintegrasi, yang tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk olahan UMKM tetapi juga akan mendorong penerimaan negara melalui peningkatan sumber pajak. “Kami optimistis *holding* UMKM

akan mengungkit *tax ratio* dan menciptakan lapangan kerja baru secara luas,” ungkap Sultan, yang juga merupakan mantan Ketua HIPMI Bengkulu.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa *holding* UMKM bertujuan untuk menghubungkan pengusaha UMKM dengan industri besar, mendukung dengan pelatihan produksi, akses pembiayaan, dan perencanaan bisnis. “Harapan kita, *holding* ini akan memberdayakan UMKM untuk mendapatkan *supply, spare parts* dan semuanya akan tersedia dalam ekosistem *holding* ini, membangun konektivitas antara UMKM dengan industri besar,” jelas Maman. (\*)

## MEMPERJUANGKAN SENI BUDAYA INDONESIA di Tengah Gempuran K-Pop



Senator Agita Nurfianti sedang berdialog dengan anggota Sanggar Seni dan Budaya Paksi Padjadjaran di Cibereum, Cimahi, Jawa Barat. (Foto Dok)

**Lela Sadiyah**

Penulis

**A**nggota Komite III DPD RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat Agita Nurfianti, dalam kunjungan resesnya ke Sanggar Seni dan Budaya Paksi Padjadjaran di Cibereum, Cimahi, Jawa Barat, pada 25 Desember 2024, menyoroti perjuangan pelestarian seni dan budaya Indonesia. “Alhamdulillah saya bangga, megapresiasi, dan mendukung terhadap kegiatan adik-adik yang sangat produktif mengisi waktunya dengan hal-hal positif untuk melestarikan seni dan budaya asli Indonesia, khususnya seni dan budaya Sunda,” ucap Agita saat berbicara tentang anak-anak dan remaja yang aktif di sanggar tersebut.

Sanggar Paksi Padjadjaran,

yang menampung sekitar 50 anak dari SD hingga SMA, telah menunjukkan prestasi luar biasa dengan menjuarai berbagai festival seni. Baru-baru ini, mereka menjadi juara di tingkat Provinsi Jawa Barat dalam kejuaraan yang diselenggarakan di Kabupaten Subang pada 21 Desember. “Selamat kepada para juara 1 dan 2, tapi yang belum juara bukan berarti tidak bagus. Semuanya pasti bagus, ada waktunya nanti adik-adik dapat meraihnya. Semangat terus dan tingkatkan prestasinya,” ujar Agita.

Namun, kendala sarana dan prasarana menjadi sorotan. Sanggar yang terbuat dari bambu dan papan berlokasi di sudut lapangan olahraga dan belum memiliki legalitas penuh. “Kami belum punya lokasi. Sementara izin dulu pakai lahan punya pabrik. Ini pun kalau tidak hujan bisa latih-

an di luar, tapi kalau hujan terpaksa hanya bisa latihan di dalam dengan ruangan yang sangat sempit,” jelas Lili Kusnadi, Ketua RT dan Pembina Sanggar.

Menanggapi masalah ini, Agita berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke pemerintah. “Mudah-mudahan ke depannya segera ada perbaikan fasilitas, tempat, dan legalitas. Semangat dalam berlatih adik-adik, semangat juga para pelatihnya. Tidak lupa perlu dukungan orang tua. Mudah-mudahan sanggar ini semakin berkembang, semakin banyak anggotanya,” tutup Agita.

Ia berjanji aspirasi ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah untuk mencari solusi agar seni dan budaya Indonesia terus berkembang dan menjadi kebanggaan di tengah pengaruh budaya asing seperti K-Pop. (\*)



Anggota DPD RI Amaliah Sobli. (Foto Istimewa)

# Sumber Energi Terbarukan Manfaatkan Potensi Daerah

**Rini Sumarni**

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) Amaliah Sobli, menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal sebagai energi terbarukan di Indonesia. Dia mencontohkan di Sumatera Selatan yang memiliki potensi besar dalam biomassa dan biogas dari industri kelapa sawit dan karet.

Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Green South Alliance – Energy Transition Convening di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh menteri, pejabat, dan anggota parlemen dari berbagai negara

Asia, termasuk India, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, dan Bangladesh. Dalam forum tersebut, para peserta membahas tantangan akses energi, keberlanjutan, dan infrastruktur yang terbatas, yang relevan bagi banyak negara berkembang.

Melalui keterangan tertulisnya, pada awal Desember 2024, Amaliah menyebutkan bahwa Sumatera Selatan memiliki luas area perkebunan kelapa sawit mencapai 1.543.833 hektare pada tahun 2020, yang menghasilkan limbah biomassa signifikan yang dapat diolah menjadi sumber energi terbarukan.

“Kita harus fokus pada potensi lokal dalam pengembangan energi terbarukan. Sumatera Selatan,

misalnya, memiliki sumber daya biomassa dan biogas yang melimpah dari industri kelapa sawit dan karet, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan,” ucap Amaliah.

Pernyataan ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050, sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional. “Pengembangan energi terbarukan dari sumber daya lokal diharapkan dapat mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil,” katanya. (\*)

# Nelayan Batam Diintimidasi Singapura, Ini Tanggapan Senator Kepri

Nanda Russia Rola

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Kepulauan Riau Ria Saptarika, mengekspresikan keprihatinannya terhadap insiden intimidasi yang dialami nelayan Batam di perairan dekat Pulau Nipah, yang berbatasan dengan Singapura. Ria Saptarika mendukung langkah Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BP2D) Kepulauan Riau yang telah meminta penjelasan resmi dari pihak Singapura mengenai insiden tersebut.

Ria menyerukan perlunya investigasi yang transparan dan menyeluruh dari kedua negara untuk mengklarifikasi detail kejadian, termasuk lokasi persis dan status perairan berdasarkan perjanjian perbatasan yang berlaku. “Perlu ada investigasi yang transparan dan menyeluruh dari kedua belah pihak (Indonesia dan Singapura), untuk mengklarifikasi

kronologi kejadian secara detail,” ucapnya di Batam pada Sabtu (28/12/2024).

Lebih lanjut, Ria menekankan pentingnya perlindungan dan keamanan bagi nelayan Indonesia, dengan mengusulkan empat langkah utama: *pertama*, edukasi yang jelas mengenai batas-batas wilayah perairan; *kedua*, peningkatan koordinasi antara Bakamla, TNI AL, dan KKP untuk penga-

wasan dan patroli; *ketiga*, pendampingan hukum bagi nelayan yang menghadapi tindakan dari aparat negara lain; dan *keempat*, langkah diplomasi intensif dengan Singapura.

Anggota DPD RI ini juga mengimbau nelayan untuk tetap tenang dan berkoordinasi dengan pihak berwenang jika mengalami kejadian serupa, serta mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan dan melindungi warga negara. “Saya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi nelayan Indonesia dan menjaga hubungan baik dengan negara tetangga,” tegasnya.

Insiden ini, menurut Ria, tidak hanya menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat tetapi juga berpotensi mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura, sehingga memerlukan penanganan yang cermat dan strategis. (\*)



Anggota DPD RI Ria Saptarika.  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Senator Niluh Minta Pemprov Bali Tertibkan Pengemudi Taksi *Online*



Anggota DPD R Niluh Djelantik. (Foto Istimewa)

**Adhi Nugroho**

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dari daerah pemilihan Bali Niluh Djelantik melalui akun media sosialnya meminta Pemerintah Provinsi Bali menertibkan pengemudi atau *driver* taksi *online*

yang beroperasi di provinsi tersebut.

Niluh Djelantik meminta kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk segera membuat aturan bahwa pengemudi mobil aplikasi *online* adalah yang memiliki KTP Bali dan mobil yang dioperasikan harus dengan nomor polisi Bali, yaitu DK.

Senator Niluh tidak ingin warga lokal Bali bagaikan ayam mati di lumbung padi. “Masalah ini akan kami sikapi dengan sangat serius. Masalah ini akan kami masukkan ke dalam agenda rapat di DPD RI,” jelas Niluh, dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (05/12/2024).

Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh anggota DPD RI Arya Wedakarna dalam menyikapi keluhan warga terkait banyaknya *driver* taksi *online* yang tidak memiliki KTP Bali. Perusahaan taksi *online* dalam merekrut *driver*, dilakukan tanpa memperhatikan alamat dan tidak mempertimbangkan KTP dari calon *driver*.

Padahal, dalam ketentuan pendaftaran mitra Gojek atau Gocar yang umum, perusahaan hanya menerima KTP sesuai dengan asal daerah masing-masing. Namun, Bali ternyata menjadi pengecualian. Dalam ketentuan pendaftaran untuk wilayah Bali, pihak perusahaan taksi *online* justru menerima semua jenis KTP dari seluruh Indonesia, tidak terbatas hanya pada warga Bali.

Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Bali, yang merasa keberadaan *driver* non-Bali bisa memengaruhi perekonomian lokal dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi penduduk asli Bali. (\*)

# Senator Minta Polda Usut Kasus TPPO Aceh ke Malaysia



Senator Azhari Cage asal Aceh. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Hestiana Kiftia Sari**

Penulis

**A**nggota DPD RI, Azhari Cage, menyatakan kecamannya terhadap praktik Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Aceh ke Malaysia. Azhari mengecam keras tindakan tersebut sebagai perilaku biadab, terutama pelaku yang terlibat dalam perdagangan anak perempuan Aceh sebagai pekerja seks di Malaysia. “TPPO itu biadab, mereka yang memperjualbelikan anak-anak perempuan Aceh ke Malaysia untuk dijadikan

pelacur itu sangat biadab dan tidak bermoral,” ujar Azhari Cage dalam pernyataannya, Rabu (25/12/2024).

Azhari Cage mendesak Polda Aceh dan Polri untuk mengusut kasus TPPO ini secara tuntas sampai ke akar-akarnya. Ia meminta agar pelaku diberikan hukuman berat. “Dimana moral mereka yang tega sesama orang Aceh menjual anak Aceh untuk dijadikan pelacur ke Malaysia, ini terkutuk dan biadab,” tegas Azhari.

Senator DPD-RI asal Aceh ini juga mengajak pemerintah Aceh

yang baru dan Presiden Prabowo untuk lebih memperhatikan penciptaan lapangan kerja di Aceh. Azhari berpendapat bahwa pembukaan lapangan kerja yang memadai akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Lebih lanjut, Azhari meminta kepada perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta yang beroperasi di Aceh untuk mengutamakan tenaga kerja lokal. “Saya minta perusahaan-perusahaan BUMN dan perusahaan swasta yang beroperasi di Aceh lebih mengutamakan tenaga kerja Aceh atau lokal, jangan sampai hasil Aceh dikeruk, masyarakatnya kelaparan,” ucap Azhari.

Pernyataan Azhari Cage ini menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan nasib masyarakat Aceh di tengah isu TPPO dan penciptaan lapangan kerja. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tindak pidana perdagangan manusia dan meningkatkan perekonomian lokal melalui peningkatan lapangan kerja.

Dengan kejadian ini, Azhari Cage berharap agar ada perubahan signifikan dalam penanganan masalah sosial dan ekonomi di Aceh, terutama terkait dengan perdagangan manusia dan pengangguran. (\*)

# Irman Berharap Masjid Taqwa Jadi Ikon Religius Sumbang



Suasana pertemuan Senator Irman Gusman dengan warga Muhammadiyah di Masjid Taqwa Kota Padang. (Foto Dok. Istimewa)

**Rini Sumarni**

Penulis

**A**nggota DPD RI, Irman Gusman, baru-baru ini mengadakan kegiatan reses di Masjid Taqwa Muhammadiyah, Sumatera Barat, di Kota Padang yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. Acara yang dilaksanakan pada Senin, (16/12/2024) ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan warga setempat. Dalam sambutannya, Irman menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Irman Gusman dalam kesempatan ini menyatakan komitmennya untuk mendukung Masjid Taqwa Muhammadiyah sebagai ikon religius di Sumatera Barat. “Masjid ini memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan religius masyarakat Sumatera Barat,” ujar Irman. Ia menambahkan, “Sebagian besar pendukung saya berasal dari Muhammadiyah, dan ini merupakan tanggung jawab saya untuk memberikan kontribusi lebih besar,”

Selama kegiatan reses, Irman juga memaparkan beberapa program prioritasnya sebagai anggota DPD RI, yang meliputi peningkatan kesejahteraan melalui sektor pendidikan, ekonomi, dan penguatan

lembaga keagamaan. Hal ini menunjukkan dedikasi Irman untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal.

Pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah menyampaikan apresiasi mereka terhadap Irman Gusman. Ketua Pengurus Masjid menyatakan, “Kunjungan ini sangat berharga bagi kami. Kehadiran Bapak Irman membuktikan komitmennya untuk mendengarkan dan mendukung aspirasi warga Sumatera Barat.”

Acara reses juga melibatkan sesi dialog di mana warga dapat menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Irman Gusman. Diskusi ini mencakup topik dari pengembangan infrastruktur hingga penguatan program berbasis keagamaan, menunjukkan keseriusan dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk pembangunan yang lebih inklusif.

Shofwan Karim, mantan Ketua PWM Sumbar, juga memberikan pandangannya tentang Irman Gusman, menggambarkan beliau sebagai sosok yang gigih dalam memperjuangkan demokrasi. “Irman memiliki karakter kuat, tangguh, dan sabar, dan kami berharap beliau terus berkolaborasi dengan Muhammadiyah dalam memperjuangkan nilai-nilai kebaikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Shofwan. (\*)

# Daud Yordan Pimpin Konsolidasi Pembentukan Pengurus Dua Ormas

Nanda Russia Rola

Penulis

**S**enator sekaligus petinju Daud Yordan, telah menggelar konsolidasi untuk pembentukan Tani Merdeka Indonesia (TMI) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Matahari Pagi Indonesia (MPI) di Provinsi Kalimantan Barat. Acara ini diselenggarakan di Kopikoe Cafe, Pontianak, pada hari Senin, 16 Desember 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan petani dan menyatukan berbagai tokoh dalam satu wadah besar yang mendukung kepentingan Indonesia, khususnya Kalimantan Barat.

Menurut Daud Yordan, pembentukan DPW di Kalimantan Barat akan menjadi wadah strategis yang mendukung program-program Kementerian Pertanian. "Saya berharap dengan segera terbentuknya pengurus DPW di Kalimantan Barat, kita bisa lebih fokus dalam memperjuangkan aspirasi petani dan memastikan bahwa program pertanian berjalan dengan optimal," ujar senator asal Kalbar ini.

Daud juga menekankan pentingnya percepatan pembentukan DPD tingkat satu di seluruh daerah di



Senator Daud Yordan saat memberikan sambutan (Foto Dok Istimewa)

Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa langkah ini penting tidak hanya untuk Kalimantan Barat tetapi juga untuk mendukung pelaksanaan program yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup petani di 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.

Pembentukan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia diproyeksikan sebagai langkah nyata dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang lebih berkelanjutan di Kalimantan Barat. "Kami berharap ini menjadi langkah maju dalam mewujudkan kesejahteraan petani," tambah Daud.

Selain mengawal kebijakan, pengurus diharapkan berperan aktif dalam mengidentifikasi tantangan

yang dihadapi petani, termasuk akses ke pupuk, pemasaran hasil tani, hingga pembiayaan usaha. "Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa petani mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang," kata Daud.

Menutup pembicaraannya, Daud mengajak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mendorong kemajuan sektor pertanian, yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Kalimantan Barat. "Langkah ini diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani dan keberlanjutan pembangunan di bumi khatulistiwa," tutup Daud. (\*)

# DJPb Sumbar Pastikan PNBP Dikelola Secara Terintegrasi



Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya bersama Kepala KPPN Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Adhi Nugroho**

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Cerint Iralloza Tasya melakukan kunjungan kerja ke Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Penerimaan Keuangan Negara, Jumat (13/12/24).

Dalam kunjungan kerja ini dihadiri oleh Kepala

KPPN lingkup Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG dan beberapa orang pejabat lainnya. Kepada Senator Cerint, Kanwil DJPb Sumbar menyampaikan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di daerah Sumbar.

DJPb Sumbar memastikan data PNBP yang di kelola terintegrasi dan akurat di seluruh provinsi dengan cara berdasarkan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Salah satu fungsi yang

dilaksanakan oleh Kanwil DJPb adalah pembinaan dan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi PNBP.

Untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme pelaksanaan PNBP berjalan secara optimal dan sesuai dengan aturan perundang-undangan salah satunya dengan memastikan pemungutan dan penyetoran PNBP ke kas negara melalui aplikasi SIMPONI yang dilakukan dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai ketentuan.

Selain itu dalam mewujudkan penatausahaan penerimaan negara yang efektif dan efisien termasuk pengelolaan dan pelaporan PNBP, DJPd telah membangun dan mengembangkan modul penerimaan negara dan sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan oleh satker kementerian/ lembaga.

Dalam pertemuan ini pihak DJPb mengajukan tentang usulan perubahan Undang-Undang Migas dan Minerba disamakan saja. Perubahan Undang-Undang Minerba yang dulunya berdasarkan royalti menjadi bagi hasil seperti Undang-Undang Migas sehingga pendapatan daerah bertambah.

Menanggapi hal tersebut Cerint berjanji akan menyampaikan pada pertemuan dengan kementerian terkait yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025 ini. (\*)



Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid saat menemui konstituentanya. (Foto Istimewa)

## Lahan Pertanian di NTB Susut 10 Ribu Ha. Tiap Tahun

**Hestiana Kiftia Sari**

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan keprihatinannya atas fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di NTB. Menurutny, setiap tahun sekitar 10.000 hektare lahan pertanian di wilayah tersebut mengalami penyusutan, yang mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem.

Mirah menekankan bahwa fenomena ini disebabkan oleh tingginya permintaan akan perumahan, yang didorong oleh *backlog* perumahan, urbanisasi, dan pertumbuhan populasi. “Dari total 270.000 hektare lahan

produksi di NTB, penyusutan sebesar 10.000 hektare per tahun adalah angka yang signifikan. Ini tidak hanya mengancam ketersediaan pangan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor agraris,” ucap Mirah.

Dia juga menyatakan bahwa pengembang properti seringkali menjadikan lahan pertanian sebagai solusi alternatif karena keterbatasan lahan strategis non-pertanian yang mahal. “Permasalahan ini tidak hanya soal penyediaan perumahan. Kita juga harus memikirkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan nasional. Pengembangan kawasan pemukiman tidak boleh mengorbankan lahan pertanian yang strategis,” tambah Mirah.

Dalam upayanya mencari

solusi, Mirah mengusulkan pengembangan perumahan di area *brownfield* atau lahan bekas industri, serta mengadopsi pendekatan *cohousing* seperti di Denmark. Langkah ini dianggap dapat memungkinkan regenerasi lahan yang sudah tidak produktif tanpa mengorbankan lahan pertanian, dan cocok dengan budaya masyarakat NTB yang mengutamakan perumahan komunal.

Selain itu, Mirah menekankan pentingnya insentif yang mendukung keberlanjutan lahan pertanian, seperti program sertifikasi lahan sawah, dan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung. Hal ini diharapkan dapat mencegah alih fungsi lahan dan mempertahankan fungsi strategis lahan pertanian di NTB. (\*)

# Anggota DPD RI Agita Nurfianti Reses ke Kiara Condong

Adhi Nugroho

Penulis

**A**nggota DPD RI Jawa Barat Agita Nurfianti, melakukan kunjungan reses ke Posyandu Kenanga di RW 12 Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, awal Desember lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi terkait kendala pelayanan kesehatan khususnya bagi balita disabilitas dan perbaikan fasilitas Posyandu setempat.

Selama kunjungan, pihak Posyandu menyampaikan beberapa masalah utama seperti proses pengobatan yang rumit melalui BPJS untuk balita penyandang *Down Syndrome*, serta kekurangan fasilitas pendukung seperti mainan yang layak dan alat pengukur tekanan darah. Agita berjanji akan menyampaikan masalah ini ke Kementerian Kesehatan dan menekankan pentingnya perbaikan alur BPJS agar lebih efisien.

Selain itu, Agita juga menyoroti masalah pada Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang mengalami keterbatasan dana, membatasi



Senator Agita Nurfianti (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

variasi dan kualitas makanan yang tersedia untuk balita. Ia berjanji untuk memperjuangkan alokasi dana yang memadai dari pemerintah pusat agar program ini bisa berjalan lebih efektif.

Posyandu Kenanga juga menghadapi masalah kekurangan ruang yang memaksa kegiatan harus dilaksanakan di jalan, serta kendala dalam pelaporan aktivitas karena keterbatasan memori pada perangkat HP pribadi para kader. Agita menegaskan pentingnya infrastruktur dan perangkat teknologi yang memadai untuk mendukung kegiatan Posyandu.

Dalam upaya mening-

katkan pelayanan bagi Lansia dan remaja, Agita mendorong kreativitas dalam kegiatan Posyandu seperti mengadakan senam bersama, serta mengajak organisasi pemuda seperti Karang Taruna untuk lebih aktif dalam pembinaan Posyandu Remaja.

Kunjungan Agita Nurfianti tidak hanya menjadi wadah mendengar aspirasi warga, tetapi juga mencerminkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat. Ia berharap sinergi antara masyarakat dan pemerintah dapat terus ditingkatkan demi kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat. (\*)



## Sidak ke Terminal Tasikmalaya Komeng Tampil dengan Humoris

**Lela Sa'adiyah**

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Alfiansyah Bustami atau Komeng melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (28/12/2024). Selain memantau kelaikan bus dan angkutan kota, Komeng juga menerima keluhan pengelola, pengemudi bus dan angkutan.

Dalam sidak itu, Komeng juga tampil dengan kocak dan langsung menaiki bus. Dia berdialog dengan petugas dan penumpang bus. Beberapa penumpang tampak

bersalaman dengan Komeng dan mengajaknya berfoto. Memakai busana serba hitam, Komeng melayani pertanyaan wartawan usai sidak.

Salah satu keluhan yang diterimanya adalah banyaknya terminal bayangan yang menyebabkan sepihnya Terminal Indihiang, Tasikmalaya. Dengan nada humoris, Komeng menduga kurang komunikasi antara Pemda dan pemerintah pusat untuk optimalisasi terminal di daerah. “Untuk menghilangkan terminal bayangan matiin aja lampunya,” ujar Komeng membuat wartawan dan petugas di tempat itu tertawa.

Terminal bayangan adalah istilah yang dipakai untuk

menggambarkan terminal non resmi. Terminal bayangan biasanya menggunakan jalur jalan raya serta tempat non resmi di luar terminal yang telah dibangun pemerintah. Di terminal bayangan banyak bus mengangkut penumpang karena tidak dikenai tarif serta dekat dengan pelanggan.

Komeng menyatakan tidak bisa serta merta menyalahkan pengelola terminal soal terminal bayangan tapi kesadaran warga juga diperlukan. “Keluhannya sama setiap tahun, kementerian dan yang di daerah harus bicara. Pusat memberikan fasilitas tapi orang sini juga harus diajak bicara,” ujarnya. (\*)



# DPD RI PRIHATIN, Pengelolaan Dana Desa Masih Diurus Pusat

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merasa prihatin karena pengelolaan dana desa yang seharusnya diserahkan kepada daerah agar program desa dapat berjalan optimal, ternyata masih diurus oleh pemerintah pusat.

**Lela Sadiyah**

Penulis

**B**adan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Desember 2024 bersama Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua BULD DPD RI, Marthin Billa, didampingi Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N Liow, Wakil Ketua BULD Abdul Hamid, dan Agita Nurfianti. Fokus utama pembahasan adalah tata kelola pemerintahan desa, terutama terkait otonomi pengelolaan dana desa.

Dalam rapat tersebut, BULD DPD RI menegaskan bahwa pengelolaan dana desa seharusnya diserahkan kepada daerah agar program desa dapat berjalan optimal. Wakil Ketua BULD DPD RI, Marthin Billa, menekankan pentingnya pengelolaan yang sesuai kebutuhan desa. "Tata kelola pemerintahan desa, terutama terkait dana desa, merupakan hal krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Marthin.

Senator asal Jambi, Elviana, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengelolaan dana desa yang masih dikontrol pemerintah pusat. Menurutnya, dana desa harusnya dikelola oleh provinsi dan kabupaten, karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan warganya. "Sudah saatnya dana desa dikelola oleh daerah terkait agar tidak terjebak dalam patokan kebijakan dari pusat," tegas Elviana.



RDPU BULD DPD RI bersama pakar membahas pengelolaan dana desa. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Senator asal Papua Selatan, Sularso, memberikan contoh kasus penggunaan dana desa yang tidak efektif. Ia menyebutkan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di wilayah Papua Selatan yang tidak terdampak pandemi, sehingga anggaran tersebut tidak dapat digunakan. "Pengelontoran dana desa yang tidak sesuai kebutuhan akan mengakibatkan program tidak berjalan. Kita perlu mendorong kebijakan agar dana desa dapat dikelola secara otonom," ujarnya.

Dukungan untuk otonomi pengelolaan dana desa juga disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Administrasi Publik UI, Irfan Ridwan Maksum, dan Koordinator Kelembagaan dan Kerja Sama di P3PD Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ismail Zainuri. Irfan menyatakan, "Desa tidak akan mandiri jika perencanaan dan penganggaran masih diatur pemerintah pusat." Pernyataan ini diaminasi oleh Ismail, yang menambahkan bahwa daerah memiliki kapasitas lebih besar untuk menentukan prioritas pembangunan desa.

Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Rian Nugroho, menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada desa dan melindungi masyarakat dari deprivasi sosial dan ekonomi. Ia mengingatkan agar desa tidak dijadikan objek eksperimen kebijakan dari pemerintah pusat. "Kita harus membangun desa dengan sinergi, tanpa menjadikan desa sebagai korban. Dengan otonomi pengelolaan dana desa, desa tetap bisa maju meski berbentuk desa," tuturnya.

Senator asal Lampung, Ahmad Bastian, mengusulkan langkah konkret untuk mempercepat otonomi dana desa. Menurutnya, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) adalah langkah yang lebih realistis dibandingkan mengubah undang-undang. Ia menekankan perlunya sinergi antara BULD DPD RI dan pemerintah untuk mendorong kebijakan ini. (\*)

# Dipertanyakan Peran Kementerian P2MI Lindungi PMI Korban TPPO?

BAP DPD RI usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Plt Dirjen Perlindungan Kementerian P2MI Irjen Pol. I Ketut Suardana, membahas upaya penyelamatan korban TPPO. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

**B**adan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat dengar pendapat pada Desember 2024 untuk mempertanyakan peran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, khususnya terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Rapat ini menghadirkan Plt. Dirjen Perlindungan Kementerian P2MI, Irjen Pol. I Ketut Suardana, sebagai narasumber utama.

Wakil Ketua BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual, menyoroti kasus TPPO yang menimpa warga Aceh dan Sumatera Utara. Korban awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan toko di Malaysia, namun malah dibawa ke Myanmar dan dipaksa bekerja sebagai admin penipuan *online* serta judi daring. “Apa upaya Kementerian P2MI dalam memberantas TPPO? Langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk memulangkan korban?” tanya Yulianus Henock. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Ke-

polisian dan kementerian terkait untuk mengatasi kasus serupa.

Senator asal Sumatera Utara, Penrad Siagian, turut mengungkapkan keprihatinannya terkait perbedaan signifikan data PMI antara World Bank dan Kementerian P2MI. Menurut data World Bank, terdapat sekitar 9 juta PMI di luar negeri, sedangkan Kementerian P2MI hanya mencatat sekitar 3 juta. “Selisihnya lebih dari 5 juta pekerja yang tidak memiliki status pekerjaan jelas. Mereka tidak akan mendapatkan perlindungan. Pemerintah harus fokus pada pekerja yang tidak berdokumen lengkap, bukan hanya yang sudah aman,” tegas Penrad.

Lebih lanjut, Penrad menyatakan perlunya perubahan peraturan untuk melindungi semua pekerja Indonesia, termasuk yang bekerja secara ilegal. Ia juga menyoroti sulitnya pemberantasan sindikat TPPO karena perekrutan sering dilakukan melalui *platform daring* seperti WhatsApp. “Bayaran untuk perekrut sangat besar, dan pola perekrutan sulit dilacak. Apalagi, kasus seperti ini terjadi di wilayah konflik seperti Myanmar,” tambahnya.

Plt. Dirjen Perlindungan Kementerian P2MI, Irjen Pol. I Ketut Suardana, menanggapi

bahwa pihaknya telah berupaya menangani kasus pemberangkatan ilegal PMI yang berujung pada TPPO. Ia menjelaskan bahwa kewenangan Kementerian P2MI terbatas pada koordinasi, namun komitmen perlindungan tetap menjadi prioritas. “Kasus dari Aceh ini masuk kategori ilegal. Kami sudah membuat surat ke Kedutaan Myanmar dan menunggu respons. Kasus *online scammer* ini paling banyak terjadi di Kamboja, Laos, dan Myanmar,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan lintas kementerian dan kerja sama internasional untuk memberantas TPPO. Hingga kini, Kementerian P2MI terus menerima laporan dan pengaduan dari korban atau keluarga korban terkait kasus perdagangan orang yang melibatkan PMI.

Rapat tersebut menghasilkan rekomendasi agar pemerintah mempercepat penyusunan mekanisme perlindungan yang komprehensif bagi semua PMI, baik yang berdokumen maupun tidak. Dengan kolaborasi antara instansi terkait, diharapkan upaya perlindungan dapat diperkuat untuk menekan angka TPPO dan melindungi PMI di berbagai negara. (\*)





## BAP Rapat Konsultasi dengan BPK RI:

# Bahas Penyelesaian Kerugian di Daerah



Pimpinan dan anggota BAP DPD RI usai menggelar rapat konsultasi dengan BPK RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Arso Pranoto Nugroho**

Penulis

**B**adan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada awal Desember 2024. Agenda utama rapat ini adalah membahas tindak lanjut atas rekomendasi pengembalian kerugian keuangan negara di daerah dan penyelesaian potensi kerugian daerah berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) II Tahun 2023 yang dilakukan BPK RI.

Wakil Ketua BAP DPD RI, Ahmad Syauqi, menyampaikan harapan agar rapat ini dapat menjadi forum untuk mencapai kesepahaman dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan anggaran negara dan daerah. Ia menekankan pentingnya mengurangi po-

tensi kerugian daerah akibat penyimpangan peraturan perundang-undangan melalui berbagai jenis pemeriksaan, termasuk pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Ahmad Syauqi juga menyoroti perlunya langkah preventif dan penyelesaian cepat terhadap temuan kerugian negara. “BAP mendorong BPK RI mempertimbangkan alasan mengapa rekomendasi atas temuan pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti, meskipun pembahasan telah dilakukan sebelum laporan hasil pemeriksaan diterbitkan,” ujarnya. Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah berulangnya temuan serupa di masa mendatang.

Dalam rapat tersebut, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi, memaparkan data kerugian negara dan daerah

selama periode 2005-2023. Dari total kerugian sebesar Rp5,02 triliun, kerugian yang telah ditetapkan pada pemerintah daerah mencapai Rp3,87 triliun atau 77,03%, sementara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp9,75 miliar atau 0,19%.

“Dari total kerugian sebesar Rp5,02 triliun, terdapat angsuran senilai Rp1,40 triliun, pelunasan sebesar Rp1,80 triliun, dan penghapusan sebesar Rp97,84 miliar. Namun, sisa kerugian yang belum diselesaikan mencapai Rp1,73 triliun atau 34,41%,” jelas Laode Nusriadi. Ia menegaskan pentingnya langkah nyata untuk mempercepat penyelesaian kerugian tersebut.

BAP DPD RI juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah untuk mengurangi risiko kerugian. Ahmad Syauqi menekankan bahwa kerugian negara yang belum terselesaikan dapat menjadi beban serius bagi pemerintahan daerah jika tidak segera ditangani.

Rapat konsultasi ini menghasilkan rekomendasi agar pemerintah daerah, BUMD, dan BPK RI dapat bersinergi dalam mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan kerugian negara dan daerah serta meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di masa mendatang. (\*)

# Komite III DPD RI: AUDIT ANGGARAN PON 2024

Helena Agustina Fernandez Ojan

Penulis

**K**omite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat finalisasi laporan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 yang dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara. Rapat berlangsung pada Senin, 9 Desember 2024, dengan agenda utama menyempurnakan temuan dan rekomendasi dalam laporan pengawasan tersebut.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan bahwa laporan ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan bangsa. “Kita ingin hasil pengawasan ini benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujarnya. Ia berharap laporan tersebut menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan PON dan tata kelola olahraga nasional.

Tenaga Ahli Komite III DPD RI, Andri Kusmayadi, memaparkan delapan temuan utama dalam laporan pengawasan. Salah satu temuan penting adalah keterlambatan pembangunan

arena pertandingan yang dinilai belum representatif. Rekomendasi dari temuan ini adalah agar pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi, memastikan perencanaan yang matang, serta mencairkan anggaran tepat waktu.



Selain itu, Andri mengungkapkan bahwa masalah akomodasi dan konsumsi atlet kerap kali kurang memadai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengawasan ketat dalam penyediaan layanan akomodasi dan konsumsi. Temuan lain meliputi penguangan anggaran penyelenggaraan, indikasi kecurangan perangkat pertandingan, serta jumlah cabang olahraga yang terlalu banyak. “PB PON perlu memastikan kompetensi perangkat pertandingan serta memanfaatkan teknologi seperti VAR untuk meminimalisir kecurangan,” jelas Andri.

Pada PON XXI 2024, sebanyak 65 cabang olahraga dengan 87 disiplin dan 1038 nomor pertandingan dipertandingkan. Hal ini memerlukan arena yang lebih banyak, waktu penyeleng-

garan yang lebih panjang, dan peningkatan anggaran. Andri merekomendasikan agar jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan disesuaikan dengan standar kompetisi internasional untuk menjaga efisiensi.

Dalam mempersiapkan PON 2028 yang akan diadakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Andri menekankan perlunya penetapan tuan rumah sejak dini agar persiapan infrastruktur dapat dilakukan secara matang. Ia juga menyoroti pentingnya pembinaan atlet secara berkelanjutan agar mereka dapat bersaing di kancah nasional dan internasional.

Ketua Komite III, Filep Wamafma, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan PON. “Kita mendesak adanya audit transparan terkait penggunaan anggaran. Selain itu, perlu ada desain besar pelaksanaan olahraga yang melibatkan Kemenpora dan instansi terkait agar permasalahan tidak terus berulang,” tegasnya.

Rapat finalisasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan PON dan pengembangan olahraga di Indonesia, baik untuk saat ini maupun masa mendatang. (\*)



## PON XXI Aceh-Sumut Dinilai Paling Amburadul

Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI usai menggelar rapat finalisasi pengawasan PON XXI Tahun 2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Muhamad Fathoni**

Penulis

**W**akil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus, menilai persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 yang diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagai salah satu PON dengan persiapan yang buruk. “Ini persiapan PON yang amburadul. Ini harus menjadi pembelajaran, terutama dari sisi hukum agar tidak terulang di masa depan,” tegas Dailami dalam rapat finalisasi pengawasan Komite III DPD RI di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Persoalan anggaran menjadi salah satu sorotan utama. Senator dari Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, menyoroti keterbatasan anggaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan PON yang bersamaan dengan pemilu. Ia menekankan pentingnya pengawasan melekat

dari DPD RI dan menegaskan perlunya tindakan hukum tegas jika ditemukan pelanggaran.

Senator Gorontalo, Jasin U. Dilo, menyarankan agar kebijakan pemilihan lokasi penyelenggaraan PON ditinjau ulang. Menurutnya, pemilihan lokasi perlu mempertimbangkan pemerataan pembangunan di berbagai daerah, sehingga setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi tuan rumah.

Senator dari DI Yogyakarta, Ahmad Syaqui Soeratno, menekankan bahwa kunci keberhasilan dalam manajemen olahraga terletak pada perencanaan. “Dalam *sport management*, 50 persen keberhasilan ada di perencanaan. Pemerintah harus turun tangan memastikan kesiapan host province jauh sebelumnya,” jelasnya.

Dalam rapat ini, juga dibahas pentingnya membangun grand design penyelenggaraan PON yang lebih terstruktur. Senator dari Bangka Belitung, Zuhri M. Syazali, menyoroti bahwa momen-

tum PON harus dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan. “Pasca-PON, daerah harus dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun untuk kepentingan jangka panjang,” ungkapnya.

Selain itu, peserta rapat menyoroti perlunya perbaikan tata kelola, mulai dari penganggaran hingga penyediaan fasilitas olahraga yang representatif. Infrastruktur yang dibangun harus memiliki fungsi jangka panjang yang tidak hanya mendukung pelaksanaan PON, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan komitmen pihaknya untuk memastikan pelaksanaan PON menjadi ajang olahraga yang tidak hanya mencetak prestasi, tetapi juga mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. “Rekomendasi hasil finalisasi ini diharapkan mampu mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola penyelenggaraan PON mendatang,” tutup Filep. (\*)

# Komite IV dan Kemenkop Sepakat Tingkatkan Perkoperasian Nasional

Theresia Oktavina

Penulis

**K**omite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada Senin (9/12/2024) di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas isu strategis terkait kewirausahaan, perkoperasian, dan ketahanan industri susu lokal dalam upaya memperkuat peran koperasi sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, menyoroti berbagai kendala dalam perkembangan koperasi di Indonesia. “Masih banyak koperasi yang tidak berjalan sesuai prinsip-prinsip koperasi, bahkan ada yang hanya nama saja. Kendala lainnya termasuk tata kelola yang kurang profesional, minimnya kompetensi SDM, serta sulitnya akses modal,” jelas Novita. Ia menegaskan perlunya kebijakan pengawasan yang efektif dari Kementerian Koperasi agar tujuan UU Perkoperasian dapat tercapai dengan maksimal.

Ketua Komite IV DPD RI, AA. Ahmad Nawardi, menyebut kolaborasi lintas sektoral dalam mendukung perkembangan koperasi dan kewirausahaan. Ia juga menyampaikan perlunya solusi konkret untuk meningkatkan kapasitas koperasi, terutama dalam mendukung



Ketua Komite IV DPD RI AA. Ahmad Nawardi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai menandatangani kesimpulan rapat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

industri lokal seperti susu. Wakil Ketua Komite IV, Arif Eka Saputra, turut menyoroti perlunya aturan yang jelas terkait pengelolaan sumber daya, seperti sumur bekas tambang Pertamina di Riau, agar koperasi dapat berperan lebih optimal.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menjelaskan rencana strategis Kementerian Koperasi dalam mendukung pencapaian Asta Cita 2025-2029. Strategi ini meliputi pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi, hilirisasi industri melalui koperasi, serta pencapaian swasembada pangan nasional. “Prioritas utama kami adalah merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) dalam penyediaan bahan pangan, digitalisasi koperasi, fasilitasi pendirian Bank Koperasi, serta peningkatan tata kelola koperasi untuk mendukung transformasi koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat,” paparnya.

Dalam diskusi ini, berbagai

masukan disampaikan untuk memperkuat sinergi antara Komite IV DPD RI dan Kemenkop. Salah satunya adalah pentingnya memastikan bahwa koperasi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga formal, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi di daerah.

Selain itu, rapat ini juga menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan industri susu lokal secara berkelanjutan melalui koperasi. Kemenkop didorong untuk bekerja sama dengan kementerian lain dan pelaku industri guna memastikan keberlanjutan produksi dan distribusi susu lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.

Komite IV DPD RI berharap hasil rapat ini dapat mendorong kebijakan yang mendukung transformasi koperasi dan penguatan sektor kewirausahaan untuk mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis koperasi di masa depan. (\*)

# PERKETAT PENGAWASAN BARANG IMPOR

Betria Eriani

Penulis



Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi dan Menteri Perdagangan Budi Santoso memperlihatkan kesimpulan rapat yang mereka tanda tangani. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**K**omite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperketat pengawasan terhadap barang impor guna melindungi industri dalam negeri. Dalam rapat kerja bersama Menteri Perdagangan pada Selasa (10/12/24) di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menegaskan bahwa pengendalian barang impor sangat penting untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi landasan penting dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ahmad Nawardi. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perdagangan, termasuk mekanisme transaksi, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan industri lokal.

Komite IV DPD RI mengidentifikasi lima tantangan utama dalam pelaksanaan UU Perdagangan. *Pertama*, tingginya impor bahan baku strategis seperti beras, gula, daging, dan garam yang masih mendominasi kebutuhan domestik. *Kedua*, maraknya produk impor melalui *platform e-commerce* yang memengaruhi daya saing industri lokal. *Ketiga*, fluktuasi harga bahan baku industri yang melemahkan daya saing produk dalam negeri. *Keempat*, dinamika regulasi perdagangan yang sering berubah, menciptakan ketidakpastian usaha. Kelima, belum optimalnya perdagangan antarpulau yang

memicu disparitas harga antarwilayah.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menjelaskan bahwa regulasi terkait perdagangan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai situasi yang berlaku. “Regulasi impor dan aturan lainnya bisa diubah atau dihapus jika tidak relevan dengan kebutuhan,” jelasnya. Ia juga memaparkan program prioritas Kementerian Perdagangan untuk tahun 2025, yang meliputi penguatan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar global.

Budi Santoso menegaskan pentingnya pengamanan pasar dalam negeri, mengingat besarnya potensi pasar domestik Indonesia. “Pasar dalam negeri harus memiliki daya saing yang baik. Jika tidak, produk asing akan terus mendominasi pasar domestik,” tambahnya.

Komite IV DPD RI berharap Kemendag dapat meningkatkan pengawasan dan koordinasi untuk menekan dampak negatif barang impor terhadap industri lokal. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional dan melindungi produk-produk dalam negeri dari persaingan tidak sehat.

Rapat ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan perdagangan yang berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat industri lokal dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. (\*)

# Raker dengan Menteri PKP, Komite II: Wujudkan Rumah Layak Huni

Didin Saputra

Penulis

**K**omite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Senin (9/12/24) di Jakarta. Agenda utama rapat ini adalah pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, dengan fokus pada perumahan dan kawasan permukiman.

Ketua Komite II DPD RI, Badikenita, memimpin rapat yang turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan pejabat Kementerian PKP. Dalam pertemuan ini, Komite II menyatakan komitmennya untuk mendukung program tiga juta rumah yang diampu Kementerian PKP, khususnya realisasi pembangunan rumah untuk masyarakat miskin, berpenghasilan rendah, dan terdampak bencana alam. “Kami mohon diberikan gambaran beberapa program Kementerian PKP. Dari tiga juta rumah yang dibangun, kami ingin terlibat dalam menyulurkannya, sehingga DPD RI dapat berperan dalam visi ‘Dari Daerah untuk Indonesia,’” kata Badikenita.



Pimpinan dan anggota Komite II DPD RI bersama Menteri PKP dan Wamen PKP Fahri Hamzah, usai rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Rapat kerja menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk dukungan penuh terhadap rencana kerja Kementerian PKP di tahun 2025. Komite II juga menyepakati keterlibatan anggotanya dalam pendataan kebutuhan rumah di daerah, saling berbagi data dan informasi terkait perumahan, serta memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terkait program Kementerian PKP yang belum tersampaikan.

Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menegaskan kesiapan kementeriannya dalam mendukung delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, khususnya program pembangunan tiga juta rumah per tahun. Program ini dirancang untuk memberikan hunian layak bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal memadai.

“Untuk mendukung program tersebut, kami mendorong kolaborasi dengan

berbagai pemangku kepentingan, seperti program CSR perusahaan swasta, pemanfaatan lahan idle, dan kerja sama luar negeri,” ujar Ara. Ia menambahkan bahwa Kementerian PKP juga tengah memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan rumah berjalan efektif dan tepat sasaran.

Komite II DPD RI menilai program ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan akses perumahan di seluruh Indonesia. Dengan kolaborasi yang baik antara DPD RI dan Kementerian PKP, diharapkan kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin dan rentan dapat terpenuhi lebih cepat dan tepat.

Ke depan, Komite II DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal implementasi program tiga juta rumah, memastikan kebijakan perumahan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. (\*)



# Kebijakan Perpajakan Jangan Membebani Masyarakat Kecil



Pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI bersama pakar hukum perpajakan Tjip Ismail. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Mas Aryo Kristiyanto**

Penulis

**K**omite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar hukum perpajakan, Tjip Ismail, di Gedung DPD RI pada Desember 2024. Dalam rapat ini, para senator mempertanyakan kebijakan perpajakan pemerintah yang dinilai berpotensi membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.

Anggota Komite IV DPD RI asal Kalimantan Selatan, Gusti Farid Hasan Aman, mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak kebijakan pajak yang lebih dirasakan oleh masyarakat kecil. “Kalau yang di atas memang sudah kaya. Nah, yang teraniaya justru kelas menengah ke bawah. Bahkan sekarang kelas menengah justru tu-

run. Apa benar seperti itu?” tanyanya.

Senator dari Banten, Habib Ali Alwi, menekankan pentingnya pajak yang bersifat adil dan proporsional. “Negara boleh minta pajak, tapi bernilai bisnis. Jangan semua masyarakat dibebani. Uang pajak seharusnya digunakan untuk memberikan pendidikan layak bagi anak-anak, bukan malah membebani masyarakat dengan berbagai macam pajak,” tegasnya.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu isu yang disoroti dalam rapat ini. Senator dari DIY, Yashinta Sekarwangi Mega, mempertanyakan efektivitas kenaikan PPN dalam meningkatkan pendapatan negara dibandingkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Pertanyaan serupa diajukan oleh Rudy Tirtayana dari Papua Selatan, yang meminta penjelasan

indikator yang digunakan Menteri Keuangan untuk menaikkan PPN.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Annakota, juga mempertanyakan strategi pajak pemerintah. “Apakah yang perlu dinaikkan itu PPN atau PPh Badan? Apakah dengan menaikkan PPN itu presiden bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%?” tanyanya, mengingatkan dampak signifikan kebijakan tersebut terhadap perekonomian nasional.

Menanggapi berbagai pertanyaan, Tjip Ismail menjelaskan bahwa pajak memegang peran penting dalam penerimaan negara. Namun, ia mengakui perubahan tarif pajak menimbulkan tantangan. “Tarif PPh Badan terus menurun, dari semula 25 persen menjadi 22 persen pada 2020, dan turun lagi menjadi 20 persen pada 2022. Sebaliknya, tarif PPN meningkat dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022, dan akan naik lagi menjadi 12 persen pada 2025,” jelas Tjip.

Rapat ini menghasilkan rekomendasi agar pemerintah meninjau ulang kebijakan perpajakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat kecil dan daya beli nasional. Komite IV DPD RI juga mendorong penerapan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah. (\*)

## Tindaklanjuti IHPS I Tahun 2024: Komite IV DPD RI Gali Informasi di BPK Banten

**Fandi Tri Prayogo**

Penulis

**K**omite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten pada Senin, 2 Desember 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami pengelolaan keuangan negara berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, khususnya terkait hasil pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan di berbagai sektor.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Pentingnya pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel, kolaborasi yang solid diharapkan mampu mendukung pembangunan, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komite IV DPD RI menyoroti sejumlah isu penting. Ahmad Nawardi mempertanyakan tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI yang tidak dilaksanakan oleh entitas dalam jangka waktu tertentu. Senator dari Kepulauan Riau, Dwi Ajeng Sekar Respaty, menanyakan langkah BPK RI dalam menghadapi entitas yang belum mengembalikan kerugian negara atau daerah sesuai rekomendasi.

Wakil Ketua Komite IV, Arif Eka Saputra, menegaskan bahwa temuan BPK RI akan menjadi bahan penting untuk penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap IHPS I Tahun 2024. “Pertimbangan ini akan disampaikan kepada DPR RI dan Presiden sebagai bagian dari pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi DPD RI,” jelasnya.

Senator Banten, Habib Ali Alwi, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Provinsi Banten atas kontribusinya dalam pengawasan keuangan



Komite IV DPD RI dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Banten. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

negara. Ia menekankan pentingnya kunjungan ini sebagai langkah strategis DPD RI dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Sejumlah senator, termasuk Rudy Tirtayana (Papua Selatan), Elviana (Jambi), dan Yance Samonsabra (Papua Barat), menyoroti daerah yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) meskipun terdapat temuan signifikan terkait Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan ketidakpatuhan. Senator NTB, Evi Apita Maya, menanyakan implementasi MoU antara BPK RI dan aparat penegak hukum (APH) yang ditandatangani pada Agustus 2020. “Apakah MoU ini telah dijalankan oleh BPK?” tanyanya.

Menanggapi berbagai pertanyaan, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Dede Sukarjo, menjelaskan bahwa pemeriksaan dan pemberian opini dilakukan berdasarkan standar kompetensi, independensi, dan integritas. “Kami memastikan auditor yang bertugas tidak terafiliasi dengan entitas mana pun. Selain itu, auditor menandatangani pakta integritas yang melarang menerima apapun dari entitas serta membahas temuan dengan pihak luar,” jelas Dede. Ia juga menyampaikan bahwa BPK RI menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran oleh auditor.

Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara DPD RI dan BPK RI dalam memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan negara. Temuan dari kunjungan ini akan menjadi dasar rekomendasi strategis untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di daerah. (\*)

# Komite III DPD RI Minta Pemerintah Maksimal Lestarikan Bahasa Daerah

**Hestiana Kiftia Sari**

Penulis

**W**akil Ketua Komite III DPD RI Dailami Firdaus, mendukung inisiatif Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) yang telah merevitalisasi sebanyak 97 bahasa daerah. “Perlu upaya maksimal dari pemerintah untuk melestarikan bahasa daerah sebagai aset bangsa dan warisan leluhur,” kata Dailami awal Desember lalu sembari menekankan pentingnya pelestarian sebagai prioritas nasional.

Senator dari Jakarta ini, mengingatkan kembali tentang upaya legislatif yang telah dilakukan sebelumnya. “Komite III DPD RI telah berinisiatif menyusun RUU tentang Bahasa Daerah sejak tahun 2015,” jelasnya. Dailami juga menyebut surat Presiden RI Nomor R-34/Pres/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang menunjuk perwakilan untuk membahas RUU tersebut, meskipun pembahasan belum juga terlaksana hingga kini.

Pada 2024, Dailami menyoroti kurangnya progres pembahasan RUU Bahasa Daerah yang terhenti akibat transisi pemerintahan. “Kami mendorong pemerintah dan DPR RI untuk mengagendakan kembali pembahasan RUU Bahasa Daerah,” ujarnya.

Data dari Badan Bahasa menyebutkan ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dengan hanya 24 yang berstatus aman dan 5 yang kritis. Selain itu, telah terjadi revitalisasi 71 bahasa daerah selama periode 2021-2023. Namun, Dailami menilai bantuan dana hingga Rp 150 juta untuk 437 komunitas sastra dan literasi serta 121 sastrawan yang berpengalaman, sebagai langkah yang masih jauh dari mencukupi.

Lebih lanjut, Dailami menekankan perlunya restrukturisasi dalam pengelolaan



Senator Dailami Firdaus. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

bahasa daerah. “Pemerintah harus lebih serius dalam upaya mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah, dengan memberikan insentif dan anggaran yang lebih besar, disertai dengan dukungan kebijakan perundang-undangan,” tegasnya. Ia menyarankan agar Badan Bahasa berada di bawah Kementerian Kebudayaan untuk fokus lebih dalam pelestarian bahasa sebagai bagian dari kebudayaan di Indonesia.

Bahasa daerah memiliki peran penting sebagai sarana ekspresi pandangan hidup, nilai sosial budaya, dan pengembangan jati diri serta identitas regional. Fungsi bahasa daerah sebagai penyimpan pengetahuan dan kearifan lokal sangat strategis sehingga memerlukan pelestarian berkelanjutan untuk menjaga fungsi dan keberlangsungannya dalam masyarakat Indonesia. (\*)

# DWP Setjen DPD RI Dorong Peran Perempuan Wujudkan Indonesia Emas 2045

Didin Saputra

Penulis

**D**harma Wanita Persatuan (DWP) Setjen DPD RI merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-25 dengan mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi Organisasi DWP Menuju Indonesia Emas 2045.” Perayaan yang dirangkai dengan peringatan hari Ibu ke-96 ini dilangsungkan pada 19 Desember 2024 di DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dihadiri oleh pejabat serta pegawai Setjen DPD RI. Acara ini bukan hanya merupakan perayaan, tetapi juga refleksi atas perjalanan dan kontribusi DWP selama seperempat abad.

Wakil Ketua DWP Setjen DPD RI Jasnety Umar, mengemukakan harapannya agar perempuan di Indonesia dapat berperan lebih aktif sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional. “Selama seperempat abad, DWP telah berperan penting sebagai organisasi istri Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya memperkuat silaturahmi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan nasional,” ungkap Jasnety.

Tema perayaan kali ini mencerminkan komitmen DWP untuk memperkuat



Foto bersama usai HUT ke-25 DWP Setjen DPD RI dan Hari Ibu ke-96 di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

pondasi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, khususnya dalam aspek teknologi, sosial, dan budaya. Transformasi organisasi adalah langkah penting untuk memastikan DWP menjadi organisasi yang kuat, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan yang cepat.

Jasnety menekankan pentingnya keluarga dalam menciptakan generasi unggul yang akan mengisi pembangunan bangsa. Keluarga yang berkualitas adalah kunci dalam mempersiapkan generasi penerus yang unggul.

Acara ini juga menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan perempuan Indonesia dalam sejarah bangsa, khususnya dalam peringatan Hari Ibu

ke-96. “Semangat para ibu yang telah memberikan kontribusi besar di berbagai bidang kehidupan harus terus kita lanjutkan melalui langkah nyata, baik dalam keluarga, organisasi, maupun masyarakat,” kata Jasnety.

Dalam kesempatan yang sama, Plh. Sekretaris Jenderal DPD RI Lalu Niqman Zahir juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi anggota DWP. “Perempuan menjadi pilar penting dalam pembangunan, mulai dari penguatan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berkelanjutan, hingga tata kelola pemerintahan. Dengan kerja bersama, Dharma Wanita Persatuan akan menjadi pelopor transformasi sosial dan budaya, serta mitra pemerintah yang tangguh,” pungkas Lalu. (\*)

# Mirah Midadan Fahmid

Rini Sumarni

Penulis

**M**irah Midadan Fahmid, adalah putri asli Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini ia dikenal sebagai politikus Indonesia dan telah menorehkan prestasi signifikan dengan terpilih sebagai salah satu dari empat wakil Provinsi NTB di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) untuk periode 2024–2029 dengan meraih 265.104 suara dalam pemilihan legislatif. Dengan latar belakang pendidikan dalam ekonomi pembangunan, ia fokus pada advokasi energi terbarukan, berperan aktif dalam Komite II DPD RI yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan di sektor ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur.

Perempuan yang selalu nampak ceria ini, memulai perjalanan akademisnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar di tempat ayahnya mengajar dan lulus pada tahun 2015 dengan skripsi yang mengkaji Dana Perimbangan dan Alokasi Belanja Modal serta dampaknya terhadap ketimpangan di Sulawesi Selatan. Keinginannya untuk mendalami ilmu ekonomi membawanya ke University of Glasgow, Skotlandia, dimana ia berhasil

memperoleh gelar Master of Science in Economic Development pada tahun 2017 berkat beasiswa LPDP. Saat ini, ia mengejar studi doktoral di Universitas Indonesia, fokus pada transisi energi di Indonesia, sambil mempertahankan keaktifan di panggung internasional dengan pengalaman sebagai Duta Pemuda Indonesia di Ukraina melalui AIESEC dan sebagai delegasi pertukaran mahasiswa di Kyoto, Jepang.

Karier profesional Mirah mencakup peran sebagai peneliti di Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) sejak tahun 2018, dan sebagai tenaga ahli di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ia juga memainkan peran kunci saat menjadi tenaga ahli di Komite II DPD RI dalam penyusunan legislasi yang mendukung energi terbarukan dan konservasi sumber daya alam, menegaskan dedikasinya untuk mendorong Indonesia menuju era energi yang lebih bersih dan

berkelanjutan.

Selain tugas legislatifnya, Mirah juga berkontribusi aktif dalam berbagai organisasi sosial dan akademik. Ia menduduki posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di organisasi masyarakat Matahari Pagi Indonesia dan sebagai Ketua Umum untuk cabang Nusa Tenggara Barat, yang semula mendukung Prabowo-Gibran dalam pemilu presiden sebelum bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan. Selain itu, Mirah juga bertugas sebagai Ketua Ikatan Alumni UNHAS di Nusa Tenggara Barat, menguatkan jaringan pendukung untuk pembangunan regional. Komitmen dan visi Mirah untuk pengembangan ekonomi yang inklusif telah membangun reputasinya sebagai tokoh yang dihormati di kancah nasional dan internasional, berjuang untuk kemajuan yang berkelanjutan dan peka terhadap kebutuhan serta potensi lokal. (\*/ sumber:wkp)



# Abcandra Muhammad Akbar Supratman

Nanda Russia Rola

Penulis

**A**bcandra Muhammad Akbar Supratman, lebih dikenal sebagai Akbar Supratman, adalah Wakil Ketua MPR RI untuk periode 2024-2029 dari unsur DPD RI. Lahir di Palu pada 1 Oktober 1998, Akbar adalah putra dari Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Idayanti Pandan, menunjukkan bahwa latar belakang keluarganya kental dengan nuansa politik dan pemerintahan. Dengan dasar kuat ini, Akbar memulai pendidikannya di SDN 25 Palu, melanjutkan ke Jubilee Junior High School Jakarta, dan menamatkan pendidikan menengah atas di Jubilee Senior High School Jakarta pada tahun 2013.

Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Akbar melanjutkan studinya di Universitas Trisakti, di mana ia meraih gelar Sarjana Hukum. Tak hanya fokus pada pendidikan formal, Akbar juga mengembangkan karir-

nya di dunia bisnis, dimulai dengan menjabat sebagai Direktur di PT Celebes

Elaeis Indonesia pada tahun 2017, sebuah perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, pada tahun 2018, ia ditunjuk sebagai Komisaris di PT Alat Kesehatan Indah Jaya.

Di samping karir bisnisnya, Akbar juga sangat aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan. Ia terlibat dalam SAPMA Pemuda Pancasila, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS). Keterlibatannya dalam berbagai organisasi ini menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam arena politik, Akbar aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Kiprahnya di politik terus berkembang hingga ia berhasil terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI. Keputusan ini diambil usai pemungutan suara yang dihadiri 143 anggota DPD RI, dimana Akbar mendapatkan 93 suara, mengalahkan kompetitor-nya, Fadel Muhammad, yang hanya mendapatkan 50 suara dalam putaran kedua pemilihan.

Dengan visi yang kuat dan dorongan untuk menjadikan MPR RI sebagai rumah kolaborasi lintas generasi, Akbar menekankan pentingnya kerjasama dan partisipasi aktif semua pihak dalam memajukan kepentingan nasional. Pendekatannya yang inklusif dan keberhasilannya dalam pemilihan ini membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin muda yang siap menghadapi tantangan masa depan Indonesia, terutama dalam memanfaatkan bonus demografi yang saat ini dihadapi oleh negara. (\*/sumber: Tempo)



# Apa dan Bagaimana Batik Pekalongan?

Lela Sadiyah

Penulis

**B**atik Pekalongan memiliki sejarah yang kaya dan beragam, terpengaruh oleh banyak budaya karena lokasinya yang strategis sebagai pelabuhan perdagangan di pesisir Jawa. Pada abad ke-19, Pekalongan menjadi titik temu dari berbagai pengaruh budaya asing, seperti Cina, Arab, dan Eropa. Ini tercermin dalam motif batik yang unik, yang menggabungkan elemen tradisional Jawa dengan pengaruh asing tersebut. Batik Pekalongan dikenal dengan warna-warnanya yang cerah dan desain yang kompleks, sering kali menggambarkan alam, flora, dan fauna dengan gaya yang sangat khas.

Selama periode kolonial Belanda, batik Pekalongan mulai berkembang karena dukungan dan pemasaran oleh kolonial. Industri batik di kota ini dikelola baik oleh pengusaha lokal maupun Belanda, yang membawa teknik cetak dan pewarnaan yang lebih modern. Teknik baru ini memungkinkan produksi batik secara massal, memperluas jangkauan pasar batik Pekalongan jauh melampaui Indonesia. Batik Pekalongan kemudian dikenal sebagai “Batik Belanda” karena popularitasnya di kalangan wanita Eropa dan kemampuannya untuk menggabungkan motif Eropa dalam desainnya.

Pasca kemerdekaan Indonesia, industri batik Pekalongan mengalami pasang surut. Meski menghadapi tantangan modernisasi dan persaingan dari batik cetak yang lebih murah, pengrajin batik di Pekalongan tetap mempertahankan teknik dan kualitas yang menjadikan batik mereka terkenal. Mereka terus memelihara keahlian tradisional sambil juga mengadaptasi desain mereka untuk memenuhi selera pasar yang berubah. Dalam beberapa dekade terakhir, ada upaya terpadu untuk merevitalisasi industri batik di Pekalongan melalui pelatihan, inovasi desain, dan pemasaran yang lebih efektif.

Pada masa kini, Batik Pekalongan telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu ikon budaya Indonesia. Pemerintah dan berbagai organisasi telah mengakui batik sebagai



Motif batik tulis Pekalongan (Foto Engrasia)

warisan budaya takbenda UNESCO, yang memberikan status lebih lanjut sebagai bentuk seni yang dihargai di seluruh dunia. Festival dan pameran batik secara teratur diadakan di Pekalongan, menarik wisatawan dan pecinta batik dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan dan keunikan batik yang hanya bisa ditemukan di kota ini.

Keterlibatan generasi muda dalam industri batik juga sedang berkembang, dengan banyak desainer muda yang menggabungkan elemen modern dengan teknik tradisional dalam kreasi mereka. Ini tidak hanya membantu menjaga relevansi batik di era modern tetapi juga membuka jalan bagi inovasi dan ekspresi kreatif baru. Batik Pekalongan kini tidak hanya dipandang sebagai pakaian tradisional tetapi juga sebagai medium ekspresi artistik yang dinamis, membawa cerita lama ke dalam konteks baru dan menarik bagi penggemar mode dan seni secara global. (\*)

# What and How is Pekalongan Batik?

Lela Sadiyah

Author

**P**ekalongan Batik has a diverse and rich history, influenced by various cultures due to the city's strategic location as a trading port in Java seashore. During the 19th century, Pekalongan was a rendezvous point for many foreign cultures like China, Arabs and Europe. It is reflected in the unique batik motif which combines traditional Javanese elements with those foreign influence. Pekalongan Batik is famous for its bright colorful quality and intricate designs which oftentimes depict the typical ornament of nature, flora and fauna.

During the Dutch colonialism did Pekalongan Batik bloom due to marketing support of the colonialist. Batik industry in the city was well-managed by both local and Dutch entrepreneurs who brought more modern printing and coloring techniques. The new technique enabled mass batik production and expansion of batik Pekalongan marketing network which reached far beyond Indonesia. It was then famously known as "Dutch Batik" due to its popularity among European's female and its capability to combine European motif in its design.

Post Indonesian independence, Pekalongan batik industry endures its ups and downs. Despite facing



(A model of Pekalongan batik (Pictures: Courtesy of Indonesia Kaya Photo))

modernization challenge and competition from cheaper printed batik, batik craftsmen in Pekalongan maintain the original technique and quality which have made their batik popular. They keep their traditional skill while concurrently adapting their design to meet the ever-changing market demand. In the past few decades there has been an integrated endeavor to revitalize Pekalongan Batik through training, design innovation, and more effective marketing.

Today, Pekalongan Batik has solidified its position as one of Indonesian cultural icons. Both the government and multiple organizations have acknowledged batik as a heritage of UNESCO immaterial culture, in which does it give further status to it as well-appreciated artwork all

over the world. Batik festivals and exhibitions are regularly held in Pekalongan which attract tourists and Batik lovers from all over the world to witness the beauty and uniqueness of Batik which can only be found in this city.

The involvement of young generation in batik industry is also growing, indicated by the many young designers combining modern elements with traditional technique in their creation. It does not only help keep batik relevance in modern era but also open the path for new innovation and creative expression. Today, Batik Pekalongan is not only considered as traditional clothing but also deemed as dynamically artistic expression medium, which brings classic story into new attractive context for fashion and art lovers all over the globe. (\*)

## Bukit Langkisau *nan Memukau*



Pemandangan ke Kota Painan dari Bukit Langkisau (YouTube)

**Betria Eriani**

Penulis

**B**ukit Langkisau, yang terletak di Painan, Sumatera Barat, adalah destinasi wisata alam yang mengesankan dengan sejarah yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat setempat. Sejak zaman dahulu, bukit ini telah menjadi tempat strategis untuk mengamati keadaan sekitar, termasuk lautan yang membentang di dekatnya. Di bawahnya terdapat Pantai Carocok, terkenal dengan masjid terapung dan aktivitas air seperti banana boat dan jet ski yang menambah keseruan pengunjung.

Dari puncak Bukit Langkisau, panorama yang ditawarkan sungguh luar biasa. Pengunjung dapat menyaksikan keindahan Teluk Painan dengan jelas, melihat kapal-kapal yang berlalu-lalang, serta ombak

yang memecah di tepi pantai. Selain itu, pemandangan luas hamparan sawah dan desa-desa di sekitar bukit juga menyuguhkan keindahan yang menyegarkan mata. Ketinggian bukit ini juga menjadi lokasi yang favorit bagi para penggemar paralayang yang ingin menikmati adrenalin sambil melihat keindahan alam Sumatera Barat dari udara.

Ekowisata di Bukit Langkisau menjadi fokus pengembangan untuk memastikan kelestarian alam sekitarnya. Jalur trekking telah disiapkan dengan baik, memudahkan pengunjung untuk mengeksplorasi keindahan alam. Pemerintah setempat juga aktif mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pelestarian lingkungan, memastikan bahwa keindahan alam bukit ini terjaga.

Selain keindahan alam, Bukit Langkisau juga mena-

warkan pengalaman budaya yang mendalam. Festival-festival lokal sering diadakan di bukit ini, memperkenalkan tradisi dan seni masyarakat Minangkabau kepada pengunjung. Kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk memperkaya pengalaman wisatawan serta mempertahankan kekayaan budaya lokal.

Melalui perpaduan antara alam, budaya, dan sejarah, Bukit Langkisau terus memikat hati para wisatawan, baik lokal maupun internasional. Keunikan dan keindahannya menjadikannya salah satu permata pariwisata di Sumatera Barat yang tak terlupakan, menarik lebih banyak pengunjung setiap tahunnya. Bukit Langkisau, dengan segala pesonanya, merupakan destinasi yang harus dikunjungi bagi mereka yang mencari keindahan alam dan kekayaan budaya. (\*/berbagai sumber)

# Fascinating Langkisau Hill

Betria Eriani

Author

**L**angkisau hill, located in Painan – West Sumatra, is an impressive natural tourism destination with its history closely intertwined with the local life. Since ancient time the hill has been a strategic spot to observe its surroundings, including the open sea stretching wide. Beneath lies Carocok Beach which is famous for its floating mosque and marine activities such as banana boating and jet skiing which boost thrilling mood among visitors

From the peak of the hill does it offer extraordinary panorama. Visitor can enjoy the scenic view of Painan bay clearly, viewing passing ships and crushing wave by

the shore. Besides, the view of vastly spread paddy field and surrounding villages also presents scenic view that refreshes the eye-sight. The height of the hill has also become favorite spot for para-gliding lovers who want to enjoy adrenalin rush while viewing the natural beauty of West Sumatra from the air.

Ecotourism in Langkisau Hill becomes the development focus for ensuring the preservation of the surrounding nature. The trekking path has well been prepared, providing convenience for visitors to explore the beauty of nature. The local government also actively holds events to raise awareness of how important environmental preservation is in order to preserve the natural beauty of the hill.

Besides the natural beauty, Langkisau Hill also offers a profound cultural experience. Local festivals, frequently held within the hill, introduce traditions and arts of Minangkabau community to the visitors. The events are one of the ways to enrich tourists' experience and to safeguard local culture wealth.

Through the integration of nature, culture and history, Langkisau Hill continues to attract both local and international tourists. Its uniqueness and beauty turn it into one of the unforgettable tourism gems in West Sumatra which attracts more tourists every year. The Hill, with all its charms, is a must-visit destination to those who search for nature beauty and culture wealth. (\*/various resources)



(The view to Painan City from Langkisau Hill (YouTube))

# Mata Air Belanda di Teluk Saleman yang Menakjubkan

Betria Eriani

Penulis

**M**ata Air Belanda di Teluk Saleman, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, merupakan salah satu destinasi wisata yang masih terjaga keasliannya dan menawarkan pesona alam yang luar biasa. Mata air ini dikenal dengan airnya yang jernih dan dingin, mengalir langsung dari pegunungan yang mengelilingi Teluk Saleman. Keunikan dari Mata Air Belanda terletak pada cerita sejarahnya, dimana pada zaman kolonial Belanda, tempat ini digunakan sebagai sumber air minum utama bagi para kolonialis.

Lokasi Mata Air Belanda sangat strategis, terletak tidak jauh dari pantai dengan hutan *mangrove* yang lebat sebagai latar belakangnya. Hutan mangrove ini tidak hanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pantai, tapi juga sebagai habitat bagi berbagai jenis satwa, seperti burung, monyet, dan spesies ikan yang hidup di perairan sekitar mata air. Ini menambah daya tarik Mata Air Belanda sebagai tempat yang sempurna untuk pengamatan burung dan kegiatan eksplorasi alam.

Para pengunjung Mata Air Belanda dapat menikmati berbagai aktivitas menarik. Berenang di kolam alami yang terbentuk dari aliran mata air menjadi kegiatan yang paling banyak diminati. Airnya yang sejuk dan menyegarkan menjadi penawar kelelahan setelah beraktivitas atau berjalan-jalan di sekitar area. Selain itu, area sekitar mata air juga dilengkapi dengan fasilitas piknik, membuatnya lokasi yang ideal untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman.

Teluk Saleman yang terletak di sekitar mata air juga menawarkan keindahan yang tidak kalah menarik. Dengan perairan yang tenang dan jernih, Teluk Saleman merupakan tempat yang tepat untuk kegiatan snorkeling dan menyelam. Wisatawan dapat menyaksikan keindahan terumbu karang dan

keanekaragaman hayati laut yang mengagumkan. Pengalaman berinteraksi langsung dengan alam bawah

laut ini tentunya akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Apalagi di Teluk Saleman juga ada penginapan bergaya tradisional di atas laut.

Mata Air Belanda dan Teluk Saleman secara keseluruhan menawarkan pengalaman wisata yang harmonis antara sejarah, kegiatan rekreasi, dan keindahan alam. Tempat ini sangat direkomendasikan bagi para pencinta alam yang ingin mencari ketenangan serta keaslian pengalaman wisata di lingkungan yang masih alami dan jauh dari hiruk pikuk kota besar. (\*/berbagai sumber)

Pemandangan di Teluk Saleman, Maluku (Foto Daily Voyagers)



## Fascinating Dutch Spring in Saleman Bay



(The scenery in Salemen Bay, Maluku (Pictures, Courtesy of Daily Voyagers) )

**Theresia Oktavina**

Author

**D**utch spring in Saleman Bay, North Seram district, Central Maluku Regency, Maluku, is one of the tourism destinations whose origin is intact, and it offers extraordinary natural charm. The spring is famous for its clear and cool water, flowing directly from the mountain range surrounding the area. The peculiarity of the spring lies in its history in which during Dutch colonialism it was used as the main drinking water for the colonialists.

The location of Dutch Spring is very strategic, sited not far from the beach with a thick mangrove forest in the background. The mangrove forest does not only play an important role to keep the ecosystem balance

of the beach but is also a proper habitat for variety of faunas such as birds, monkeys, and various species of fish living in the surrounding water of the spring. This adds attraction to the Dutch spring as a perfect spot for bird observation and other nature exploration.

Visitors to Dutch Spring can enjoy various attractive activities. Swimming in a natural pool formed by the water flow is the most favorite activity. The cool refreshing water is a cure to tiredness after doing some activities or taking a walk to the surrounding area. In addition, the surrounding area of the spring is furnished with picnic facility which makes it an ideal location to spend the time with family and friends.

The Saleman Bay, located near the spring, also offers

equally interesting beauty. With its still and clear water, the bay is a perfect place for snorkeling and scuba-diving activities. Tourists can enjoy the view of beautiful coral reef and amazing marine bio-diversity. The experience to have direct interaction with underwater world will indeed be a memorable one. Let alone there is a traditionally-styled floating lodging in Saleman bay.

The Dutch Spring and Saleman Bay altogether offer tourism experience which is a harmony of history, recreational activities, and nature beauty. These places are highly recommendable for nature lovers who are seeking for tranquility and genuine tourist experience in a natural environment, far from hectic big cities. (\*/various sources)

Betria Eriani

Penulis

**P**ical Sikai adalah salah satu hidangan khas dari Bukittinggi, Sumatera Barat, yang menawarkan cita rasa unik dan menggugah selera. Kuliner ini merupakan campuran dari berbagai komponen dasar seperti mi, tauge, ketimun, dan potongan kentang yang direbus hingga lembut. Keunikan Pical Sikai terletak pada saus kacangnya yang kental dan pedas, memberikan sensasi rasa yang khas dan membedakannya dari jenis pical lainnya di Minangkabau.

Proses pembuatan Pical Sikai membutuhkan ketelitian dan keahlian khusus dalam mengolah saus kacangnya. Saus ini dibuat dari campuran kacang tanah yang digiling halus, cabai, bawang putih, dan beberapa rempah lain yang dirahasiakan. Rempah-rempah tersebut diulek bersama hingga menciptakan aroma yang menggoda dan rasa yang mendalam. Komposisi ini tidak hanya menghasilkan rasa yang kaya, tetapi juga tekstur yang sempurna untuk melengkapi bahan-bahan lain dalam hidangan.

Pical Sikai biasanya disajikan dalam keadaan dingin atau suhu ruang, menjadikannya pilihan yang menyegarkan terutama di hari yang panas. Penyajiannya pun cukup unik, di mana semua komponen disusun secara terpisah dalam satu piring besar sehingga memungkinkan para penikmatnya untuk mencampurkan sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Pengalaman interaktif ini menambah kesenangan dalam menikmati Pical Sikai, seolah-olah pengunjung diajak untuk berpartisipasi langsung dalam tradisi kuliner Minang.

Berlokasi dekat kawasan atas Ngarai Sianok, Pical Sikai tidak hanya sekedar makanan tetapi juga bagian dari identitas dan budaya lokal. Hidangan ini sering kali hadir dalam berbagai acara komunal dan perayaan, menggambarkan kebersamaan dan keramahan masyarakat setempat.

Seiring dengan meningkatnya ketertarikan akan kuliner Nusantara, Pical Sikai mulai dikenal sejak 1948 ini diapresiasi tidak hanya oleh penduduk lokal tetapi juga oleh wisatawan dari berbagai daerah, yang tertarik untuk mencicipi keunikan kuliner khas kota kelahiran Bung Hatta ini. (\*/berbagai sumber)



Foto Sumatera Barat-Desa Wisata

# Tasting Pical Sikai of Bukittinggi

Betria Eriani

Author

**P**ical Sikai is a typical dish of Bukittinggi, West Sumatra which offers appetite-boosting unique taste. The dish is a mixture of basic ingredients such as noodle, bean sprout, cucumber, and cuts of boiled soft potato. The uniqueness of Pical Sikai lies in the thick and hot peanut sauce that gives a typical sensation which is distinct from any other picals in Minangkabau.

Pical Sikai making process needs precision and special skill in preparing the peanut sauce. It is made from mixture of finely ground peanuts, chilies, garlics and several other secret spices. The spices are manually ground together until it produces mouth-watering aroma of a fine taste. The composition does not only produce a rich taste but also a perfect texture to complement other ingredients in the dish.

Pical Sikai is usually served as cold dish or at room temperature, which makes it a fresh dish choice especially during hot days. The serving is pretty unique where all components are arranged separately in a large plate to enable the enjoying people to mix by themselves the combination according to each taste preference. The interactive experience also adds to the fun in enjoying Pical Sikai, as if the guests are directly invited to participate in Minang culinary tradition.

Located near Sianok Canyon, Pical Sikai is not only a dish but also a part of local identity and culture. The dish is often served in diverse community and celebration events, which symbolizes togetherness and courtesy of the local people.

Corresponding to the increase of interest toward Nusantara culinary delights, Pical Sikai has begun to be known since 1948, appreciated not only by the locals but also



(Picture: courtesy of West Sumatra – Tourism Village)

by tourists from various places who are attracted to taste the typical culinary delight of the city of Bung Hatta's birthplace. (\*various sources)



Tasting Pical Sikai Bukittinggi (Foto Swsatika Nohara)

Theresia Oktavina

Penulis

**S**alah satu masakan khas Maluku yang sangat populer dan dicari oleh banyak orang adalah Papeda. Papeda adalah hidangan tradisional yang terbuat dari sagu, bahan makanan utama di banyak daerah di Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua. Teksturnya yang unik, lengket dan mirip dengan gel, menjadikan Papeda sebuah pengalaman kuliner yang berbeda bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan konsistensinya.

Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning, yang merupakan campuran dari ikan yang dimasak dengan rempah-rempah seperti kunyit, serai, dan daun jeruk, memberikan aroma yang sangat harum dan rasa yang gurih. Kuah kuning ini tidak hanya memberi warna yang menarik tetapi juga rasa yang kuat dan sangat cocok dengan lembutnya Papeda. Hidangan ini sering menjadi menu wajib di berbagai kesempatan, mulai dari makan sehari-hari hingga perayaan besar.

Pengolahan Papeda sendiri cukup unik. Sagu yang merupakan bahan dasar Papeda, diolah dari pohon sagu yang banyak tumbuh di Maluku. Proses ekstraksi sagu dari batang pohonnya merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga dan keahlian, yang kemudian diolah menjadi bubur sagu yang kental saat dimasak dengan air panas. Proses memasaknya yang membutuhkan kesabaran dan kecepatan dalam mengaduk agar tidak menggumpal, menjadikan Papeda sebagai simbol dari kekayaan kuliner Maluku.

Selain itu, Papeda juga sangat dikenal karena manfaat kesehatannya. Sagu sebagai bahan dasar Papeda kaya akan karbohidrat dan rendah lemak, menjadikannya pilihan makanan yang baik bagi mereka yang menjalani diet rendah lemak. Selain itu, Papeda juga sering dikonsumsi oleh masyarakat lokal sebagai sumber energi



Papeda (Foto Ist)

yang baik untuk menjalani hari, terutama bagi mereka yang beraktivitas tinggi.

Papeda tidak hanya sekadar makanan, tetapi juga bagian dari identitas dan kebudayaan Maluku. Hidangan ini tidak hanya menggambarkan keragaman gastronomi Indonesia, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat Maluku memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan cara yang berkelanjutan. Bagi para wisatawan, mencoba Papeda bukan hanya sekadar mencicipi makanan, tetapi juga merasakan bagian dari sejarah dan budaya Maluku yang kaya. (\*/berbagai sumber)

ME  
NU*Papeda, Favourite Dish from Eastern Indonesia***Theresia Oktavina**

Author

**O**ne of the most popular and most sought-after typical Maluku cuisine is Papeda. It is a traditional cuisine made of sago, a primary staple of many areas in Eastern Indonesia, particularly Maluku and Papua. The unique texture of a sticky, gel-like dish makes eating Papeda a different culinary experience for many people, especially among those who are not used to its content.

Papeda is normally served with yellow fish soup which is a mixture of fish cooked with spices such as turmeric, lemongrass, and lime leaves which produce fine aroma and savory taste. The yellow-colored soup does not only give attractive color but also a rich taste perfectly suitable with the soft papeda. The dish is often a mandatory menu in diverse occasions, from daily meals to eventful celebration.

Papeda preparation is unique enough. Sago is the basic ingredient of Papeda, produced from sago trees which are rampant in Maluku. The extraction process of sago from the tree trunk is an energy consuming activity that needs special skill; it is then cooked into sticky sago porridge when boiled with hot water. The cooking process needs endurance and speed in steering to avoid clotting which makes Papeda a symbol of Maluku culinary delight.

Additionally, Papeda is also well known for its health benefit. Sago, the basic ingredient of Papeda, is rich of carbohydrate and low in fat which makes it a proper dish choice for those running with low-fat dietary program. Besides, it is frequently consumed by the local for a good energy source to walk the day, especially among those who are involved in high activities.

Papeda is not only a dish, but also a part of Maluku identity and culture. The dish does not only depict the diversity of Indonesian gastronomy, but also shows how Maluku people utilize the existing natural resources sustainably. To tourists tasting Papeda is not only tasting another dish, but also enjoying a part of rich history and culture of Maluku. (\*various sources).

# GAGASAN INOVASI DEMOKRASI, PENGUATAN DPD RI DAN “KEBIJAKAN HIJAU” (resensi buku “Green Democracy” Sultan Baktiar Najamudin)

Oleh:  
Rama Mahesa/Analisis Legislatif Ahli Muda Biro Sekretariat Pimpinan, Setjen DPD RI

## Identitas Buku

Judul Buku : Green Democracy  
Penulis : Sultan Baktiar Najamudin  
Cetakan : Cetakan pertama  
(hard cover)  
Tahun Terbit : September 2024  
Penerbit : CV. Green Publisher  
Ukuran buku : 17,78 x 24,89  
Jumlah Halaman: xxxi + 365 halaman  
ISBN : 978-623-8709-20-5



## Sinopsis

**I**stilah “Green Democracy” masih awam bagi sebagian orang. Penelusuran daring frasa tersebut menunjukkan masih sedikit hasil yang ditampilkan. Meskipun bukan menjadi hal pertama di dunia, namun buku “Green Democracy” karya Sultan Baktiar Najamudin seperti oase dari sosok pemimpin lembaga tinggi negara yang menaruh perhatian lebih atas perbaikan mekanisme demokrasi nasional, isu lingkungan dan keberlangsungan peningkatan kualitas hidup, ditengah maraknya isu *high cost politic*, deforestasi dan peningkatan ekstrim pemanasan global. Buku setebal lebih dari 360 halaman menyampaikan pandangan dan gagasan dari seorang Sultan B. Najamudin atas gagasan inovasi demokrasi, penguatan lembaga DPD RI, pelestarian lingkungan hingga peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045. Penulis mendeskripsikan “Demokrasi hijau” sebagai konsep demokrasi yang relevan dengan ke-Indonesia-an yang sarat dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya musyawarah serta gotong-royong. Demokrasi yang jelas bertujuan pada peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan bangsa Indonesia.

Sultan berpandangan bahwa sebagai bangsa kita perlu melakukan refleksi dan evaluasi serta kemudian berinovasi dalam mewujudkan sistem politik dan ketatanegaraan inklusif, adil dan demokratis. Inovasi demokrasi yang penulis rekomendasikan adalah terkait inovasi sistem pemilu, sistem parlemen, sistem partai politik, dan mekanisme legislasi yang kolaboratif serta inklusif. Terutama bagaimana meletakkan DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang sesungguhnya.

## “Green Democracy”

Materi buku dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, pertama mengelaborasi pembahasan tentang demokrasi dalam pengertian teori dan praktik di Indonesia, kedua memaparkan tentang bagaimana DPD RI sebagai lembaga di mana penulis menjadi pemimpin dapat diperkuat dan bagian terakhir menyajikan konsep Green Policy dalam perspektif seorang Sultan B. Najamudin.

Bagi Sultan, perspektif filosofis warna hijau memberikan kesan segar dan bertumbuh. Warna yang menjadi simbol harapan, kemakmuran dan kesejahteraan. Sehingga

dalam konteks ini Green Democracy adalah demokrasi yang relevan dengan ke-Indonesiaan. Demokrasi bangsa yang sarat dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya musyawarah dan gotong royong. Demokrasi yang jelas bertujuan pada peningkatan kualitas hidup dan kehidupan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, isu-isu terkait bonus demografi dan pengembangan UMKM adalah hal yang menjadi perhatian serius dalam buku ini. Upaya distribusi SDM ke daerah-daerah yang potensial secara SDA juga menjadi strategi yang Sultan usulkan sebagai upaya mengurangi angka pengangguran di kota-kota besar. Terutama SDM di sektor pertanian dan perikanan. Isu perubahan iklim dan lingkungan hidup juga menjadi sorotan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap isu lingkungan. Penulis mendorong kebijakan hijau (green policy) sebagai prinsip dalam setiap kebijakan ekonomi ke depan.

### **Padat dan Momen Tepat**

Sebagai seorang politisi muda yang sudah banyak memakan asam garam pengalaman dunia organisasi, aktivis kepemudaan dan politik praktis, Sultan Baktiar Najamudin dengan jeli melihat momen tepat dan krusial dalam mempublikasikan buku ini. Saya yakin, Sultan B. Najamudin sudah menyimpan materi buku ini jauh sebelum diterbitkan pada September 2024 yang lalu. Namun dengan pertimbangan yang “matang” dan penuh dengan “kalkulasi” politik dan memperhatikan situasi nasional, beliau memilih menerbitkannya pada semester kedua 2024 ini.

Materi buku “Green Democracy” yang “padat” dengan inovasi dan gagasan Sultan perlu mendapat atensi yang besar oleh pemimpin nasional, seluruh lapisan masyarakat dan juga kolega internal di DPD RI itu sendiri. Tahun 2024 adalah tahun politik dalam siklus demokrasi Indonesia. Pergantian kepemimpinan nasional dan lokal terjadi di

tahun ini.

Sultan dengan jeli melihat hal tersebut. Dengan publikasi buku ini, Sultan berhasil menarik atensi “petinggi” negeri yang terbukti dengan banyaknya testimoni dan tanggapan para pesohor dalam buku ini. Tak tanggung-tanggung mulai dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, Presiden Bapak Prabowo Subianto hingga saja Imam Besar Masjid Washington DC Mr. Bashar Arafat dan Senator Saud Anwar dari Senat Amerika Serikat memberikan kata pengantar dan sambutan. Secara psikologis, penerbitan buku ini telah mendongkrak elektabilitas Sultan dalam pemilihan Paket Pimpinan DPD RI masa jabatan 2024-2029. Sultan berhasil memanfaatkan momen krusial dengan menggaet atensi anggota DPD RI khususnya anggota *new comer* untuk melihat sosok Sultan B. Najamudin.

### **Tantangan “Kehijauan Demokrasi”**

Ketiadaan bagian kesimpulan atau penutup dalam buku ini kemudian membawa pertanyaan kepada pembaca: apa langkah konkret Sultan sebagai penulis dalam mengimplementasikan konsep “demokrasi hijau” dalam keseharian beliau?. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Sultan kedepan untuk bagaimana menstimulus tiap kebijakan yang akan diambil beliau baik sebagai pribadi, sebagai Ketua DPD, sebagai politisi maupun sebagai tokoh nasional agar mencerminkan harapan untuk selalu tumbuh dan menjaga keseimbangan yang berkesinambungan.

Kita mengapresiasi kehadiran buku ini sebagai khasanah paradigma baru dalam memandang demokrasi Indonesia yang menjaga antara harapan dan keseimbangan ekosistem politik, stabilitas nasional dan ekologi lingkungan. Ditengah surplus politisi, sosok Sultan Baktiar Najamudin menjadi harapan untuk mengisi “defisit” negarawan yang ber visi jauh kedepan.

Kita menunggu kiprah selanjutnya dari seorang Sultan Baktiar Najamudin dalam memujudkan konsep besar ini. (\*)



# PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Selamat Memperingati

## *Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW*



Semoga makin meningkatkan keimanan, ketaatan,  
dan hubungan manusia dengan Allah SWT. Aamiin YRA.

27 Januari 2025



### MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

